

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,  
TEKANAN KOERSIF, TEKANAN MIMETIK DAN TEKANAN  
NORMATIF TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI DI KOTA MANADO**



**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Nama: Nadila Dwi Anggraeni**

**No. Mahasiwa: 17312551**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, TEKANAN  
KOERSIF, TEKANAN MIMETIK, DAN TEKANAN NORMATIF  
TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA MANADO**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Srata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika UII

Oleh :

Nama: Nadila Dwi Anggraeni

No. Mahasiswa: 17312551

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 26 April 2021

Penulis,


(Nadila Dwi Anggraeni)

## HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi ini telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi  
dengan judul:**

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, TEKANAN  
KOERSIF, TEKANAN MIMETIK, DAN TEKANAN NORMATIF  
TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA MANADO**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Nadila Dwi Anggraeni

No. Mahasiswa: 17312551

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 27 April 2021

Dosen Pembimbing,



(Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D)

## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

### SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tekanan Koersif, Tekanan Mimetik dan Tekanan Normatif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi di Kota Manado

Disusun oleh : NADILA DWI ANGGRAENI

Nomor Mahasiswa : 17312551

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Jum'at, 04 Juni 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D

Penguji : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, Dr., M.Si

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tekanan Koersif, Tekanan Mimetik dan Tekanan Normatif Terhadap Akuntabilitas Lapora Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi di Kota Manado”** disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berjasa dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis selama penyusunan skripsi. Terima kasih banyak atas setiap waktu

yang telah Bapak berikan dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi. Semoga ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan dapat selalu bermanfaat. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

2. Pemerintah Kota Manado yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian beserta seluruh pegawai yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
4. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., CMA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
6. Seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan nasihat selama penulis menjalankan perkuliahan.
7. Seluruh staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak M. Makfud dan Ibu Linda Lihawa yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, maupun nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Serta kakak-kakak penulis,

yakni Ridho Eko Nugroho dan Nadia Rizkha Soewandi Sriansyah yang selalu memberikan dukungan dan doa.

9. Sahabat-sahabat team “Hamba Allah” yang tersayang, yakni Arsyita Niam Fajrina, Endang Oktaviani, Kurnia Widiastuti Widodo, Wahyu Listari Talaman Reani. Terima kasih banyak telah menemani hari-hari penulis selama di bangku kuliah. Terima kasih telah memberikan dukungan serta doa. Semoga kesuksesan selalui menyertai kalian.
10. Sahabat seperjuangan lainnya, yakni Rahajeng Anindyajati dan Kamalia Wijayanti. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kesuksesan selalui menyertai kalian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Dalam hal ini penulis turut menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabararakatuh*

Yogyakarta, 21 April 2021

Penulis,

(Nadila Dwi Anggraeni)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Abstrak .....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kontribusi Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA .....	11
2.1 Literature Review .....	11
2.2 Landasan Teori .....	25
2.2.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	25
2.2.2 Teori Institusional ( <i>Institusional Theory</i> ) .....	26
2.2.3 Teori <i>Stakeholder</i> .....	27
2.2.4 Laporan Keuangan.....	28
2.2.5 Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	28

2.2.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	29
2.2.7 Tekanan Koersif .....	29
2.2.8 Tekanan Mimetik.....	30
2.2.9 Tekanan Normatif.....	30
2.2.10 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).....	31
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	33
2.3.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan .....	33
2.3.2 Pengaruh Tekanan Koersif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan .....	35
2.3.3 Pengaruh Tekanan Mimetik Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan .....	36
2.3.4 Pengaruh Tekanan Normatif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan .....	37
2.3.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).....	39
2.3.6 Pengaruh Tekanan Koersif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) .....	41
2.3.7 Pengaruh Tekanan Mimetik Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) .....	43
2.3.8 Pengaruh Tekanan Normatif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) .....	45
2.4 Kerangka Pemikiran .....	47
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Populasi dan Sampel.....	48
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	49
3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel .....	49
3.3.1 Variabel Dependen .....	49
3.3.2 Variabel Independen .....	50
3.3.3 Variabel Moderasi .....	53
3.4 Alat Statistik.....	54
3.4.1 Uji Kualitas Data .....	54
3.4.2 Uji Moderated Regression Analysis (MRA) .....	55

3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	56
3.5 Pengujian Hipotesis .....	57
3.5.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	57
3.5.2 Tekanan Koersif .....	57
3.5.3 Tekanan Mimetik.....	57
3.5.4 Tekanan Normatif.....	57
3.5.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	58
BAB IV .....	60
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	60
4.1 Hasil Pengumpulan Data .....	60
4.2 Deskripsi Responden .....	61
4.2 Uji Kualitas Data .....	62
4.2.1 Uji Validitas .....	62
4.2.2 Uji Reliabilitas.....	64
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	65
4.3.1 Uji Multikolinieritas .....	65
4.3.2 Uji Heterokedastisitas .....	66
4.3.3 Uji Normalitas .....	67
4.4 Analisis Regresi Linier .....	67
4.4.1 Analisis Regresi Linier Sederhana.....	67
4.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda .....	69
4.5 Pengujian Hipotesis .....	72
4.5.1 Uji t.....	72
4.6 Pembahasan.....	76
4.6.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	76
4.6.2 Pengaruh Tekanan Koersif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	77
4.6.3 Pengaruh Tekanan Mimetik terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	78

4.6.4 Pengaruh Tekanan Normatif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	79
4.6.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Hubungan Antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	80
4.6.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Hubungan Antara Tekanan Koersif dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	82
4.6.7 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Hubungan Antara Tekanan Mimetik dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	84
4.6.8 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Hubungan Antara Tekanan Normatif dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	85
BAB V.....	87
KESIMPULAN DAN SARAN .....	87
5.1 Kesimpulan .....	87
5.2 Implikasi Penelitian.....	89
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	90
5.4 Saran.....	91
DAFTAR REFERENSI.....	92
LAMPIRAN .....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	60
Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Responden .....	61
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas .....	63
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas .....	64

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas .....	65
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas .....	67
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana .....	68
Tabel 4.9 Hasil Moderated Regression Analysis (MRA) .....	70



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	47
-------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian .....	103
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian .....	104
Lampiran 3 : Tabulasi Data Hasil Kuesioner Responden .....	110
Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	130
Lampiran 5 : Hasil Uji Multikolinieritas.....	138
Lampiran 6 : Hasil Uji Heterokedastisitas .....	138

Lampiran 7 : Hasil Uji Normalitas .....	139
Lampiran 8 : Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana.....	139
Lampiran 9 : Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) .....	140
Lampiran 10 : Daftar Distribusi Kuesioner .....	140



## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of the use of information technology, coercive pressure, mimetic pressure and normative pressure on the accountability of local government financial reports with the government's internal control system as a moderating variable. The sample used in this study amounted to 124 respondents consisting of employees of the SKPD Kota Manado. The sample selection method using purposive sampling. Data collection was obtained through distributing questionnaires to SKPD in Kota Manado that carried out tasks related to financial management which were then processed using SPSS version 21. The results showed that the use of information technology, coercive pressure and normative pressure had a significant positive effect on the accountability of local government financial*

*reports. Mimetic pressure has no significant effect on the accountability of local government financial reports. The government internal control system as a moderating variable can affect the relationship between the use of information technology and the accountability of local government financial reports, and the internal control system cannot affect the relationship between coercive pressure, mimetic pressure and normative pressure on the accountability of local government financial reports.*

**Keywords** : *accountability of local government financial reports, utilization of information technology, coercive pressure, mimetic pressure, normative pressure, government internal control system*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, tekanan koersif, tekanan mimetik dan tekanan normatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 124 responden yang terdiri dari pegawai SKPD pemerintah Kota Manado. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada SKPD di Kota Manado yang melaksanakan tugas terkait pengelolaan keuangan yang kemudian data tersebut diolah menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, tekanan koersif dan tekanan normatif berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tekanan mimetik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta sistem pengendalian internal tidak dapat mempengaruhi hubungan antara tekanan koersif, tekanan mimetik dan tekanan normatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci** : akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, tekanan koersif, tekanan mimetik, tekanan normatif, sistem pengendalian internal pemerintah



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan era reformasi di Indonesia saat ini mengalami peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memfokuskan pada pemerintah daerah. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar hukum otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2004) otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya dengan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 58 (2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Beberapa pemerintah daerah telah membuat suatu Perda (Peraturan daerah) mengenai akuntabilitas. Berdasarkan [www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id) terdapat beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang saat ini memiliki Perda mengenai akuntabilitas pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat, yakni antara lain Kabupaten Mamuju, Provinsi Maluku, Kabupaten Pinrang, Provinsi Jawa Timur, Provinsi

Jawa Barat, Kabupaten Sleman, Kabupaten Karawang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah menyadari pentingnya tata kelola keuangan daerah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan di mana peraturan-peraturan tersebut sulit untuk diterapkan oleh pemerintah daerah terutama pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sebagai level pelaksana.

Permasalahan peraturan tersebut menggambarkan rendahnya keinginan organisasi publik dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Tidak adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak negatif yang timbul dapat berupa memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, meningkatkan praktik-praktik korupsi, serta penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (Ridha & Basuki, 2019). Maka dari itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat ini mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk mempublikasikan hasil audit laporan keuangan melalui media massa lokal. Karena selama ini hasil pemeriksaan laporan keuangan masing-masing entitas biasanya hanya disajikan melalui situs resmi masing-masing entitas. Entitas yang wajib mempublikasikan laporan keuangannya di media massa adalah instansi pemerintah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi rencananya tahun 2021 mendatang seluruh entitas wajib mempublikasikan laporan keuangannya yang sudah diaudit BPK ke media massa, tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan instansi pemerintah daerah.

(sumber: <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/ObzMxjeN-bpk-wajibkan-entitas-umumkan-laporan-keuangan-di-media>, diakses pada 29 Desember 2020)

Berdasarkan uraian diatas, instansi pemerintah dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memberikan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait akuntabilitas laporan keuangan. Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai akuntabilitas keuangan pemerintah daerah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan variabel yang konsisten antara lain Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dari penelitian Superdi (2017), Angraini et al. (2016), Arfianty & Virलयani (2017), (Awalia, 2017). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dari penelitian Febri et al., (2019), Sweetenia et al., (2019), Adeyemi & Olarewaju (2019), (Veronica et al., 2017), (Munzhedzi, 2016), (Pahala et al., 2016) (Aziz et al., 2015), (Kawatu & Kewo, 2019). Kompetensi SDM dari penelitian Setyanto, Eko & Ritchi (2018), (Dewi et al., 2019), (Atmadja & Saputra, 2018), (Veronica et al., 2017), (Barizah et al., 2016). Aksesibilitas laporan keuangan dari penelitian Fikrian et al. (2016), Awalia (2017), dan Kurniawan & Rahayu (2019). Kualitas laporan keuangan dari penelitian Fikrian et al. (2016), (Baker & Chin, 2016), Awalia (2017), serta Kurniawan & Rahayu (2019). Penyajian laporan keuangan dari penelitian Superdi, (2017), Angraini et al., (2016), Sweetenia et al., (2019), Hasan, (2016), (Sari, 2017), dan (Fikrian et al., 2016). Pengendalian keuangan dari penelitian Adebayo & Ilesanmi (2020). Benchmarking dari penelitian Kajimbwa (2018) dan Enwereji & Uwizeyimana (2019).

Selain hasil penelitian yang konsisten tersebut turut terdapat variabel yang tidak konsisten seperti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada penelitian Asfiryati (2017), Kompetensi SDM penelitian Febri et al., (2019) dan Sweetenia et

al., (2019), Penyajian Laporan Keuangan pada penelitian Sari (2017), Pengendalian Keuangan (*Financial Control*) penelitian Akinyele (2016), Pemanfaatan Teknologi Informasi pada penelitian Riandani (2017) dan Karyadi (2019).

Pada penelitian sebelumnya ditemukan berbagai kelemahan antara lain pada penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2016) yang menyatakan karena kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner mengakibatkan hasil penelitian tersebut rentan terhadap biasnya jawaban responden. Penelitian Kisworo & Shauki (2019) memiliki keterbatasan dengan terbatasnya jumlah responden yang digunakan pada penelitian tersebut. Penelitian Yosefrinaldi (2013) menyatakan bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 36,29% sedangkan sisanya 61,24% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian tersebut. Kelemahan yang lain dari seluruh penelitian sebelumnya adalah hanya menggunakan satu teori seperti Dewi et al. (2019), Febri et al. (2019), Mzenzi & Gaspar (2015) hanya menggunakan teori agensi dan penelitian Setyanto, Eko, Ritchi (2018) hanya menggunakan teori entitas.

Berdasarkan kelemahan penelitian sebelumnya, penelitian Ridha & Basuki (2019) menyarankan untuk menambah indikator lainnya yang mungkin dapat memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya faktor politik, jumlah anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian Riandani (2017) juga menyarankan untuk menambah variabel independen seperti keterandalan pelaporan laporan keuangan, serta penelitian oleh Purbasari & Bawono (2017) menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memasukkan

variabel moderasi sehingga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel dependen dan independen. Penelitian Budiarto & Damayanti (2020) menyarankan untuk memperluas populasi penelitian pada organisasi sektor publik lainnya yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas seperti puskesmas, rumah sakit, atau instansi pendidikan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ridha & Basuki (2019) serta Chodijah & Hidayah (2018). Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu menambahkan variabel moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai pengembangan dari penelitian Yolanda (2018), tetapi menggunakan variabel independen yang berbeda dari penelitian tersebut. Pembaharuan pada penelitian ini adalah menggunakan teori baru yakni teori institusional. Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial dimana organisasi berada (DiMaggio & Powell, 1983). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi, teori institusional, dan teori *stakeholder*. Teori-teori tersebut digunakan karena dianggap relevan dengan penelitian ini yang juga merujuk pada bagaimana kinerja pemerintah memberikan pertanggungjawaban terutama dalam hal keuangan kepada masyarakat. Maka dalam penelitian ini, variabel sistem pengendalian internal pemerintah akan menjadi variabel moderasi antara pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi, tekanan isomorphic yang terdiri dari tekanan koersif, tekanan normatif dan tekanan mimetic terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD) Kota Manado. Sehingga judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tekanan Koersif, Tekanan Mimetik, dan Tekanan Normatif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi di Kota Manado”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado?
2. Apakah tekanan koersif berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado?
3. Apakah tekanan mimetik berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado?
4. Apakah tekanan normatif berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado?
5. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado?

6. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh tekanan koersif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado?
7. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh tekanan mimetik terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado?
8. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pengaruh tekanan normatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado.
2. Untuk menganalisis pengaruh tekanan koersif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado.
3. Untuk menganalisis pengaruh tekanan mimetik terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado.
4. Untuk menganalisis pengaruh tekanan normatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado.

5. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado.
6. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi tekanan koersif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado.
7. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi tekanan mimetik terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado.
8. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi tekanan normatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Kota Manado.

#### **1.4 Kontribusi Penelitian**

1. Bagi Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas pemerintah daerah, khususnya pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan perpektif teori isomorphic institusional, teori agensi dan teori *stakeholder*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi literatur bagi penelitian serupa yang mungkin akan dilakukan oleh peneliti-peneliti berikutnya.

## 2. Kebijakan Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja kepala daerah beserta seluruh jajarannya dalam menerapkan akuntabilitas laporan keuangan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan teori dan pengertian variabel, literature review, telaah penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk populasi, sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesa.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, dilakukan pengujian dan menjelaskan interpretasi hasil dari data tersebut.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Literature Review

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas serta membuat keputusan yang tepat.

Akuntabilitas laporan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan laporan keuangan kepada masyarakat secara jujur dan terbuka. Akuntabilitas yang efektif mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut : 1) Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh, artinya pemerintah bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi masing Satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD). 2) Mencakup aspek-aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan sesuai prosedur. 3) Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja maupun unit instansi. 4) Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian informasi 5) Adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi. 6) Terdapat tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.

Beberapa peneliti di Indonesia telah melakukan penelitian tentang variabel independent yang memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan daerah oleh (Sweetenia et al., 2019), (Kurniawan & Rahayu, 2019), (Fikrian et al., 2016), (Sari, 2017), (Superdi, 2017), (Wirama, 2019), (Febri et al., 2019), (Salamah, 2013), (Asfiryati, 2017), (Awalia, 2017), (Trisaptiya et al., 2016), (Arfianty & Virlayani, 2017), (Purbasari & Bawono, 2017), (Hasan, 2016), (Arfianty & Virlayani, 2017), (Basuki et al., 2019), (Atmadja & Saputra, 2018), (Kewo, 2017), (Rahayu et al., 2014), (Ani & Arifin, 2016), (Ridha & Basuki, 2019), (Budiarso & Damayanti, 2020), (Indrayani et al., 2017), (Chodijah & Hidayah, 2018), (Pradita et al., 2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dari luar negeri adalah (Adebayo & Ilesanmi, 2020), (Quayle et al., 2020), (Kuwawenaruwa et al., 2020), (Adeyemi & Olanrewaju, 2019), (Muraina & Dandago, 2019), (Rafindadi & Olanrewaju, 2019), (Keerasuntonpong et al., 2019), (Enwereji & Uwizeyimana, 2019), (Dewi et al., 2019), (Bowrey et al., 2019), (Vluggen et al., 2019), (Kawatu & Kewo, 2019), (Atmadja & Saputra, 2018), (Kajimbwa, 2018), (Iqmal et al., 2018), (Al-shbail & Aman, 2018), (Brown, 2018), (Brusca et al., 2018), (Tumwebaze et al., 2018), (Wisdom & Oyebisi, 2017), (Sintejudéanu & Farcas, 2017), (Veronica et al., 2017), (Anselmi et al., 2017), (Agyenim-Boateng et al., 2017), (Akinyele, 2016), (Barizah et al., 2016), (Bowrey et al., 2016), (Baker & Chin, 2016), (Munzhedzi, 2016), (Pahala et al., 2016), (Igbokwe-Ibeto et al., 2016), (Aziz et al., 2015), (Mzenzi & Gaspar, 2015), (Muñoz & Bolívar, 2015), (Zerban, 2015), (Bracci et al., 2015), (Ahrens & Ferry, 2015), (Nzewi & Musokeru, 2014), (Dalnial et al., 2014), (Shah, 2014), (Keerasuntonpong, Prae. Dunstan, Keitha. Khanna, 2014), (Mutiganda,

2013), (Lourenço et al., 2013), (Bakar & Ismail, 2011), (Kluvers, Ron. Tippett, 2011), (Samkin & Schneider, 2010), (Monfardini, 2010), (Verbeeten, 2008), (Kudo, 2008), (Bowrey, 2007), (Zucker, 1987).

Mengacu pada penelitian-penelitian tersebut, terbagi menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan daerah, yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya masyarakat, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, *financial control*, ketepatan waktu, keandalan dan kecukupan, *benchmarking*, kinerja manajemen, pemanfaatan teknologi informasi dan tekanan isomoprhic.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Variabel	Hasil penelitian dan peneliti
1.	Sistem akuntansi keuangan daerah	Sistem akuntansi keuangan daerah signifikan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah (Angraini et al., 2016; Arfianty & Virlyani, 2017; Awalia, 2017; Superdi, 2017)  Sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah (Asfiryati, 2017)
2.	Sistem pengendalian internal	Sistem pengendalian internal signifikan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah (Adeyemi & Olarewaju, 2019; Aziz et al., 2015; Enwereji & Uwizeyimana, 2019; Iqmal et al., 2018; Kawatu & Kewo, 2019; Munzhedzi, 2016; Pahala et al., 2016)
3.	Kompetensi SDM	Kompetensi SDM signifikan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah

		(Atmadja & Saputra, 2018; Barizah et al., 2016; Dewi et al., 2019; Enwereji & Uwizeyimana, 2019; Veronica et al., 2017)  Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah (Febri et al., 2019; Sweetenia et al., 2019)
4.	Aksesibilitas laporan keuangan	Aksesibilitas laporan keuangan signifikan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah (Baker & Chin, 2016; Keerasuntonpong et al., 2019)
5.	Kualitas laporan keuangan	Kualitas laporan keuangan signifikan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah (Dewi et al., 2019; Muraina & Dandago, 2019)
6.	Penyajian laporan keuangan	Penyajian laporan keuangan signifikan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah (Angraini et al., 2016; Asfiryati, 2017; Hasan, 2016; Superdi, 2017)  Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah (Sari, 2017)
7.	<i>Financial control</i>	<i>Financial control</i> signifikan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dengan mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan (Adebayo & Ilesanmi, 2020)
8.	<i>Benchmarking</i>	<i>Benchmarking</i> signifikan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Kajimbwa, 2018)
9.	Kinerja manajemen	Kinerja manajemen signifikan meningkatkan akuntabilitas keuangan (Kawatu & Kewo, 2019)
10.	Pemanfaatan teknologi informasi	Pemanfaatan teknologi informasi signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Chodijah & Hidayah, 2018; Haza, 2019)  Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa (Karyadi, 2019)

**Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.** Berdasarkan PP Nomor 60

Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah karena akuntabilitas keuangan suatu daerah akan terlaksana jika sistem pengendalian intern dalam instansi daerah berjalan dengan baik. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Febri et al., (2019) sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Sweetenia et al., (2019), Adeyemi & Olarewaju (2019), (Veronica et al., 2017), (Munzhedzi, 2016), (Pahala et al., 2016) (Aziz et al., 2015), (Kawatu & Kewo, 2019) yang juga memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

**Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)** adalah kemampuan yang dimiliki seseorang baik berupa pengetahuan, keterampilan, atau perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab guna mencapai tujuan organisasi atau instansi. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah karena dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Informasi laporan keuangan yang dihasilkan harus memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar. Sedangkan sumber yang menghasilkannya berkaitan dengan kemampuan SDM dalam menjalankan sistem

atau menghasilkan informasi yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Setyanto, Eko & Ritchi (2018), (Dewi et al., 2019), (Atmadja & Saputra, 2018), (Veronica et al., 2017), (Barizah et al., 2016) bahwa kompetensi SDM terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Febri et al., (2019) dan Sweetenia et al., (2019) menghasilkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini karena kompetensi aparatur pemerintah desa dalam penelitian tersebut hanya mengukur kemampuan dalam mengelola administrasi keuangan seperti menyusun, memberi nomor, dan menyimpan bukti-bukti transaksi, dan input transaksi kode akun, kode mata anggaran, serta mencocokkan dengan saldo kas.

**Aksesibilitas laporan keuangan.** Menurut (Awalia, 2017) aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan kepada masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah karena semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan akan tercapai, tetapi jika aksesibilitasnya rendah maka akuntabilitas laporan keuangan daerah tidak transparan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikrian et al. (2016), (Baker & Chin, 2016), Awalia (2017), Kurniawan & Rahayu (2019), dan

(Keerasuntonpong et al., 2019) bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah.

**Kualitas laporan keuangan** merupakan kesesuaian proses pencatatan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010). Kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah karena dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya antara lain: dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hafzan, Fikrian (2019), dan Sweetenia, Caesari, Aprillia, & Purwantini (2019) bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah.

**Penyajian laporan keuangan.** Menurut Sweetenia et al. (2019) penyajian laporan keuangan merupakan representasi terstruktur posisi keuangan pemerintah akibat transaksi yang dilakukan selama periode tertentu. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa

penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini sesuai dan didukung oleh peneliti-penelitian lainnya seperti (Superdi, 2017), (Angraini et al., 2016), (Sweetenia et al., 2019), (Hasan, 2016), (Sari, 2017), (Fikrian et al., 2016). Namun berbeda dengan (Sari, 2017) yang menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan karena disebabkan penyajian laporan keuangan oleh masing-masing SKPD belum sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal ini dapat dilihat dari fenomena publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi pemerintah daerah.

**Pengendalian keuangan.** Menurut Adebayo & Ilesanmi (2020) *financial control* atau pengendalian keuangan merupakan proses untuk memastikan bahwa aset atau sumber daya keuangan diperoleh secara sah dan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian keuangan dapat dikaitkan dengan prosedur yang digunakan oleh manajemen organisasi untuk menegakkan kontrol dan akuntabilitas keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Adebayo & Ilesanmi, 2020) menyimpulkan bahwa pengendalian keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Akinyele (2016) bahwa pengendalian keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

**Benchmarking.** Menurut Kajimbwa (2018) *benchmarking* adalah pengukuran sistematis dan perbandingan aktivitas individu dan organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja mereka. *Benchmarking* menjadi pedoman

dalam meningkatkan akuntabilitas public pemerintah sehingga harus bekerja sebagai *agents* bagi masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Teori Keagenan, bahwa *agents* dalam hal ini adalah pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab kepada *principal* (masyarakat) yang pada gilirannya menuntut pertanggungjawaban. Ini berkaitan dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara penggunaan *benchmarking* dengan akuntabilitas keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dan didukung oleh penelitian (Kajimbwa, 2018) dan (Enwereji & Uwizeyimana, 2019). Persamaan pada penelitian ini terletak pada hasil penelitian, dimana *benchmarking* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.

**Kinerja.** Kinerja menurut studi Kawatu & Kewo (2019) adalah pekerjaan yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Kinerja manajerial diartikan sebagai tingkat kompetensi manajer dalam menjalankan aktivitas manajemen. Semakin baik kinerja manajerial, semakin tinggi akuntabilitas keuangan suatu organisasi. Hal ini sesuai dan didukung oleh penelitian (Kawatu & Kewo, 2019) bahwa kinerja manajemen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

**Pemanfaatan teknologi informasi.** Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Haza, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses

kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Chodijah & Hidayah, 2018). Hasil penelitian Haza (2019) dan Chodijah & Hidayah (2018) membuktikan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan menurut penelitian Riandani (2017) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan penelitian Karyadi (2019) menghasilkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan variabel yang konsisten, antara lain penelitian Superdi (2017), Angraini et al. (2016), Arfianty & Virlayani (2017), (Awalia, 2017) yang menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Febri et al., (2019), Sweetenia et al., (2019), Adeyemi & Olarewaju (2019), (Veronica et al., 2017), (Munzhedzi, 2016), (Pahala et al., 2016) (Aziz et al., 2015), (Kawatu & Kewo, 2019) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Setyanto, Eko & Ritchi (2018), (Dewi et al., 2019), (Atmadja & Saputra, 2018), (Veronica et al., 2017), (Barizah et al., 2016) menyimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Fikrian et al. (2016), Awalia (2017), dan Kurniawan & Rahayu (2019) bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian Fikrian et al. (2016), (Baker & Chin, 2016), Awalia (2017), Kurniawan & Rahayu (2019), dan (Keerasuntonpong et al., 2019) bahwa kualitas laporan keuangan

berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Superdi, (2017), Angraini et al., (2016), Sweetenia et al., (2019), Hasan, (2016), (Sari, 2017), (Fikrian et al., 2016) menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Adebayo & Ilesanmi (2020) menyimpulkan bahwa pengendalian keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan. Kajimbwa (2018) dan Enwereji & Uwizeyimana (2019) menyimpulkan bahwa *benchmarking* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan variabel yang tidak konsisten antara lain sistem akuntansi keuangan daerah pada penelitian Asfiryati (2017) bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah. Febri et al., (2019) dan Sweetenia et al., (2019) menghasilkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah karena kompetensi aparatur pemerintah desa dalam penelitian tersebut hanya mengukur kemampuan dalam mengelola administrasi keuangan seperti menyusun, memberi nomor, dan menyimpan bukti-bukti transaksi, dan input transaksi kode akun, kode mata anggaran, serta mencocokkan dengan saldo kas. Sari (2017) menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan karena disebabkan penyajian laporan keuangan oleh masing-masing SKPD belum sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal ini dapat dilihat dari fenomena publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya

belum menjadi hal yang umum bagi pemerintah daerah. Akinyele (2016) menyimpulkan bahwa pengendalian keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian Riandani (2017) menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan penelitian Karyadi (2019) menghasilkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Beberapa teori yang digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya antara lain, teori agensi yang digunakan oleh penelitian Dewi et al. (2019), Febri et al. (2019), Mzenzi & Gaspar (2015). Teori agensi merupakan konsep yang membedakan antara *principal* dan *agents*. Dalam perusahaan, *principal* adalah pemegang saham (pemilik) dan *agents* adalah manajer. Manajer yang secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Teori agensi dapat ditemukan pada organisasi sector public yaitu antara pemerintah (*agents*) dan rakyat (*principal*). Di mana pemerintah dipilih serta diberikan kepercayaan untuk berkerja demi kepentingan rakyat. Sehingga pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Adapun kelemahan dari teori agensi yang digunakan pada penelitian-penelitian tersebut yaitu munculnya masalah keagenan yang biasanya terjadi ketika ada perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) dan rakyat (*agents*), misalnya ketika pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan

yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan kelemahan teori-teori yang digunakan pada penelitian terdahulu dan saran yang diusulkan oleh penelitian Ridha & Basuki (2019) yaitu untuk menambah indikator lainnya yang mungkin dapat memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya faktor politik, jumlah anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian Riandani (2017) menyarankan untuk menambah variabel independen seperti keterandalan pelaporan laporan keuangan. Penelitian Purbasari & Bawono (2017) menyarankan untuk penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel dependen dan independen.

Pembaharuan pada penelitian ini adalah menggunakan teori baru yakni teori isomorphic institusional. Isomorphic institusional merupakan bagian dari teori institusional. Teori institusional adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi (pelembagaan). Menurut DiMaggio & Powell (1983) dalam Ani & Arifin (2016) teori institusional organisasi mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri karena dengan adanya pelanggaran mungkin akan mempertanyakan legitimasi organisasi dengan demikian mempengaruhi kemampuannya untuk melindungi sumber daya dan dukungan sosial. Institusional isomorfisme merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pelembagaan. Menurut DiMaggio & Powell (1983) terdapat tiga mekanisme perubahan institusional isomorphism yaitu *coercive isomorphism*, *mimetic isomorphism* dan *normative isomorphism*. *Coercive*

*isomorphism*, adalah isomorfisme yang terjadi karena tekanan baik formal maupun informal yang diterima organisasi. Tekanan ini bisa berasal dari organisasi lain ataupun dari harapan masyarakat sekitar di mana organisasi tersebut berada. *Normative isomorphism*, adalah isomorfisme yang terjadi karena tuntutan organisasi profesional. *Mimetic isomorphism*, adalah isomorfisme yang terjadi karena organisasi meniru organisasi lain yang telah berhasil. Selain itu, menurut Zucker (1987) organisasi dipengaruhi oleh tekanan normatif yang timbul dari sumber eksternal dan organisasi itu sendiri.

Model penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ridha & Basuki (2019) dan Chodijah & Hidayah (2018) yang juga menggunakan model *isomorphic* institusional dalam penelitiannya. Sesuai saran dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menambahkan variabel moderasi yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai pengembangan dari penelitian Yolanda (2018). Adapun dasar teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi dan teori institusional *isomorphic*. Teori-teori tersebut digunakan karena dianggap relevan dengan penelitian ini dan mengarah bagaimana kinerja pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban terutama dalam hal keuangan kepada publik atau masyarakat. Penelitian ini akan berfokus pada variabel yang tidak konsisten meliputi penelitian Karyadi (2019), Ani & Arifin (2016), Pradita et al. (2019), (Indrayani et al., 2017). Maka dalam penelitian ini, variabel sistem pengendalian internal pemerintah akan menjadi variabel moderasi antara pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi, tekanan *isomorphic* yang terdiri dari tekanan koersif, tekanan normatif dan tekanan *mimetic* terhadap akuntabilitas

laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Manado.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan perbedaan konsep antara pihak manajer dan pemilik dalam suatu organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa dalam perusahaan memiliki pemegang saham (pemilik) yaitu *principal* dan manajemen adalah *agents*. Manajemen bertanggung jawab dalam memperoleh keuntungan bagi pemilik, dan sebagai imbalannya akan menerima bonus sesuai dengan kontrak. Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan di mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang diinginkan, sehingga timbulah perbedaan informasi antara manajemen dengan pemilik. Teori keagenan telah dipraktikkan pada organisasi sektor publik yakni antara pemerintah (*agents*) dan rakyat (*principal*). Pemerintah dipilih oleh rakyat serta diberikan kepercayaan untuk berkerja demi kepentingan rakyat, sehingga pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Akan tetapi dalam teori keagenan ini akan muncul suatu masalah keagenan yang biasanya terjadi ketika ada perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) dan rakyat (*agents*), misalnya ketika pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau

kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

### **2.2.2 Teori Institusional (*Institutional Theory*)**

Isomorphic institusional merupakan bagian dari teori institusional. Teori institusional mengemukakan bahwa terbentuknya suatu organisasi oleh adanya lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi atau pelembagaan (Ani & Arifin, 2016). Institusional isomorfisme merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pelembagaan. Menurut DiMaggio & Powell (1983) terdapat tiga mekanisme perubahan institusional isomorfisme yaitu coercive isomorphism, mimetic isomorphism dan normative isomorphism. Pertama coercive isomorphism, adalah proses yang terjadi karena tekanan baik formal maupun informal yang diterima organisasi. Tekanan ini bisa berasal dari pengaruh politik dan masalah legitimasi dari luar organisasi. Kedua mimetik isomorphism, adalah proses yang terjadi dimana organisasi meniru organisasi lain yang telah berhasil. Misalnya terjadi ketika teknologi organisasi kurang dipahami, tujuan yang ambigu, atau ketika terdapat ketidakpastian lingkungan, sebagai contoh perusahaan di Jepang banyak ditiru oleh perusahaan-perusahaan di negara lain karena dianggap berhasil. Ketiga normative isomorphism, adalah suatu proses perubahan dalam organisasi karena adanya tekanan profesionalisasi. DiMaggio & Powell (1983) menyatakan bahwa tekanan profesionalisasi tersebut berasal dari pendidikan formal agar semakin profesional dalam kinerjanya.

### 2.2.3 Teori *Stakeholder*

Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute (RSI) pada tahun 1963 yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman, seorang Profesor dari University of Virginia. Menurut Matuleviciene & Stravinskiene (2015) mendefinisikan *stakeholder* sebagai grup atau individu yang dapat memberikan pengaruh atas kegiatan suatu organisasi atau entitas. *Stakeholder* meliputi pemegang saham, kreditor, konsumen atau pembeli, *supplier* atau pemasok bahan baku, pemerintah, masyarakat, karyawan yang bekerja, dan berbagai pihak lain. Penelitian Dewi et al., (2019) menyatakan bahwa semua pemangku kepentingan atau *stakeholder* memiliki hak istimewa untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan perusahaan yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan.

Saat ini bukan hanya perusahaan swasta yang perlu memberikan akuntabilitas perusahaannya kepada pemegang saham, namun organisasi sektor public dalam hal ini adalah pemerintah juga diharuskan untuk melakukan akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban dalam hal sumber daya keuangan, melalui menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hak masyarakat dapat diperoleh dengan adanya informasi keuangan tersebut. Teori stakeholder berkaitan dengan usaha organisasi dalam menjalin hubungan baik antara stakeholder sehingga dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap organisasi dengan mengungkapkan laporan keuangan kepada publik. Organisasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah pemerintah yang diwajibkan untuk

menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga bermanfaat bagi para stakeholder dalam pengambilan keputusan.

#### **2.2.4 Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tersebut bahwa laporan keuangan pemerintah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **2.2.5 Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan,

maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah sebagai bagian dari pelayanan publik. Sistem akuntansi pemerintah memiliki data transaksi yang rumit dan ukuran yang besar, oleh karena itu dibutuhkan penggunaan teknologi informasi agar dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara tepat waktu.

Pemanfaatan teknologi informasi terkait dengan (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat (Chodijah & Hidayah, 2018).

### **2.2.7 Tekanan Koersif**

Isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*) terjadi karena tekanan formal maupun informal yang diterima organisasi, dimana suatu organisasi berada dalam tekanan yang diharuskan untuk patuh pada aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Tekanan koersif merupakan tekanan eksternal yang dapat diberikan oleh

pemerintah, peraturan, atau lembaga untuk mengadopsi suatu struktur atau sistem (Ashworth et al., 2009). Dengan adanya undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi akan mengalami beberapa perubahan terkait dengan situasi yang dihadapinya (Ani & Arifin, 2016).

### **2.2.8 Tekanan Mimetik**

Tekanan mimetic (*mimetic isomorphism*) adalah tekanan yang terjadi karena organisasi meniru organisasi lain yang dianggap telah berhasil. Hal ini akan mengakibatkan muncul respons ketidakpastian pada suatu aturan tertentu. Ketidakpastian terjadi karena berbagai hal dalam organisasi, misalnya perubahan kultur politik dalam pemerintahan, peraturan yang sering berubah-ubah, dan sebagainya. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu aturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam menerapkan peraturan yang baru (Ridha & Basuki, 2019).

### **2.2.9 Tekanan Normatif**

Tekanan normative (*normative isomorphism*) adalah tekanan yang terjadi karena adanya tuntutan bagi orang-orang yang bekerja dalam organisasi untuk bersikap secara profesional bekerja guna meningkatkan pelayanan public. Terdapat dua aspek tekanan normatif yakni: (1) latar belakang pendidikan formal, dan legitimasi berdasar aspek kognitif yang dihasilkan dari perguruan tinggi, dan (2) tingkat pertumbuhan dan pengaruh lembaga professional yang memungkinkan praktek-praktek baru menyebar dengan cepat diseluruh organisasi (DiMaggio & Powell, 1983)

### **2.2.10 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. SPIP terdiri atas lima unsur yang meliputi:

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;  
dan

## 2. Penilaian Risiko

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 13 bahwa seluruh pimpinan instansi di dalam pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko

## 3. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 18 bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian tersebut meliputi:

- a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. pembinaan sumber daya manusia
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. pengendalian fisik atas asset
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. pemisahan fungsi
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 41 dan Pasal 42 bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, dimana komunikasi terkait informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud, maka pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 43 bahwa pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

### **2.3 Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas**

##### **Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (2005) dijelaskan bahwa untuk menindaklanjuti

terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah juga diharuskan untuk dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Berdasarkan teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa kelompok atau individu dapat memberikan pengaruh atas kegiatan suatu organisasi atau entitas, maka terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada akuntabilitas laporan keuangan. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat didukung oleh kemampuan setiap individu dalam pemerintahan yang menggunakan teknologi tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Haza (2019) dan Chodijah & Hidayah (2018) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan menurut penelitian Riandani (2017) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan penelitian Karyadi (2019) menghasilkan pemanfaatan teknologi informasi tidak

berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **2.3.2 Pengaruh Tekanan Koersif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan teori institusional tekanan koersif berasal dari organisasi lain ataupun dari lingkungan di sekitar organisasi tersebut berada. Isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*) terjadi karena tekanan formal maupun informal yang diterima organisasi, dimana suatu organisasi berada dalam tekanan yang diharuskan untuk patuh pada aturan dalam mencapai tujuan. Misalnya ketika organisasi terpaksa untuk melakukan aturan. DiMaggio & Powell (1983) mengatakan tekanan koersif bisa juga berasal dari pengaruh politik dan masalah legitimasi. Tekanan koersif adalah tekanan eksternal yang dapat diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga untuk mengadopsi suatu struktur atau sistem (Ashworth et al., 2009). Apabila terdapat tekanan koersif melalui peraturan maka akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, dengan adanya peraturan bertujuan untuk mengatur praktik yang dijalankan agar dapat diterapkan dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa tekanan koersif terjadi ketika organisasi dipaksa untuk menerapkan regulasi dalam hal ini adalah undang-undang atau terjadinya tekanan dari organisasi lain. Hasil penelitian Ridha & Basuki (2019) dan Wulanda (2017) menyatakan bahwa tekanan eksternal yang mewakili isomorfisme koersif berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti

bahwa peraturan dan masyarakat menjadi pendorong terjadinya transparansi pelaporan keuangan pemerintah, karena dengan adanya peraturan perundang-undangan pemerintah mampu memberikan transparansi keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Tekanan koersif berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah

### **2.3.3 Pengaruh Tekanan Mimetik Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Salah satu bentuk teori isomorfisme institusional adalah tekanan mimetik (Teo & Benbasat, 2003) dalam Perdana (2011). Tekanan mimetic memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku organisasi lain yang muncul sebagai respons ketidakpastian pada suatu aturan tertentu. Ketidakpastian muncul karena berbagai hal dalam organisasi, misalnya perubahan kultur politik dalam pemerintahan, peraturan yang sering berubah-ubah, dan sebagainya. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu aturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam menerapkan peraturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa tindakan terbaik yang dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang dianggap berhasil (Ridha & Basuki, 2019). Pemerintah diharuskan untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyajikan informasi dengan jujur, dapat diuji kebenarannya, serta tidak berpihak kepada pihak

tertentu, dimana hal ini sesuai dengan karakteristik kualitatif keterandalan (*reliability*) laporan keuangan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Hasil penelitian Ridha & Basuki (2019) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan yang mewakili tekanan mimetic tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan, sedangkan penelitian (Pradita et al., 2019) menyatakan bahwa ketidakpastian berpengaruh negative signifikan terhadap transparansi laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pergantian elit politik yang memaksa segala sesuatu yang telah diprogramkan pada kepemimpinan sebelumnya menjadi tidak terlaksana. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Tekanan mimetik berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah

#### **2.3.4 Pengaruh Tekanan Normatif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Dalam teori institusional organisasi cenderung untuk bertindak sama dengan organisasi lain. Faktor yang mempengaruhi organisasi melakukan hal tersebut yakni berasal internal organisasi dan lingkungan. Tekanan normatif muncul sebagai konsekuensi dari profesionalisme organisasi tertentu (DiMaggio & Powell, 1983). Menurut DiMaggio & Powell (1983) profesionalisme merupakan representasi secara kolektif oleh anggota dalam pekerjaan tertentu untuk menentukan cara-cara yang tepat dalam bertindak. Teori institusional ini menjelaskan bahwa individu

dalam profesi tertentu menunjukkan norma-norma dan perilaku budaya yang terkait dengan pekerjaan mereka. Terdapat dua aspek tekanan normatif yakni: (1) latar belakang pendidikan formal, dan legitimasi berdasar aspek kognitif yang dihasilkan dari perguruan tinggi, dan (2) tingkat pertumbuhan dan pengaruh lembaga professional yang memungkinkan praktek-praktek baru menyebar dengan cepat diseluruh organisasi (DiMaggio & Powell, 1983). Tekanan normative dapat terjadi karena adanya tuntutan profesionalisme dalam bekerja guna meningkatkan pelayanan public. Keterlibatan organisasi pemerintah daerah yang professional dan berintegritas dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel akan dapat tercapai jika para pegawai SKPD memiliki kemampuan yang andal dan kompeten terutama dalam bidang keuangan, sehingga mampu memenuhi standar profesionalisme pada setiap SKPD. Semakin kuat implementasi profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan dan prosedur organisasi tentu akan mendorong meningkatnya akuntabilitas.

Hasil penelitian Ridha & Basuki (2019) menyatakan bahwa komitmen manajemen yang mewakili tekanan normative berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Penelitian Indrayani et al. (2017) yang juga menggunakan teori institusional menyatakan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Tekanan normative berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah

### **2.3.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur sistem pengendalian internal pemerintah mengacu pada sistem pengendalian internal yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan yakni meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan (Yolanda, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febri et al., (2019) sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Sweetenia et al., (2019), Adeyemi & Olarewaju (2019), (Veronica et al., 2017), (Munzhedzi, 2016), (Pahala et al., 2016) (Aziz et al., 2015), (Kawatu & Kewo, 2019) yang juga memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini karena karena akuntabilitas keuangan suatu daerah akan terlaksana jika sistem pengendalian intern dalam instansi daerah berjalan dengan baik.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang

berhubungan dengan teknologi (Haza, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi terkait dengan (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat (Chodijah & Hidayah, 2018). Berdasarkan teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa kelompok atau individu dapat memberikan pengaruh atas kegiatan suatu organisasi atau entitas, maka terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada akuntabilitas laporan keuangan. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat didukung oleh kemampuan setiap individu dalam pemerintahan yang menggunakan teknologi tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Haza (2019) dan Chodijah & Hidayah (2018) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan menurut penelitian Riandani (2017) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan penelitian Karyadi (2019) menghasilkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5 : Sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah

### **2.3.6 Pengaruh Tekanan Koersif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur sistem pengendalian internal pemerintah mengacu pada sistem pengendalian internal yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan yakni meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan (Yolanda, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febri et al., (2019) sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Sweetenia et al., (2019), Adeyemi & Olarewaju (2019), (Veronica et al., 2017), (Munzhedzi, 2016), (Pahala et al., 2016) (Aziz et al., 2015), (Kawatu & Kewo, 2019) yang juga memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini karena karena akuntabilitas keuangan suatu daerah akan terlaksana jika sistem pengendalian intern dalam instansi daerah berjalan dengan baik.

Dalam teori institusional tekanan koersif berasal dari organisasi lain ataupun dari lingkungan di sekitar organisasi tersebut berada. Isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*) terjadi karena tekanan formal maupun informal yang diterima organisasi, dimana suatu organisasi berada dalam tekanan yang diharuskan untuk

patuh pada aturan dalam mencapai tujuan. Misalnya ketika organisasi terpaksa untuk melakukan aturan. DiMaggio & Powell (1983) mengatakan tekanan koersif bisa juga berasal dari pengaruh politik dan masalah legitimasi. Tekanan koersif adalah tekanan eksternal yang dapat diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga untuk mengadopsi suatu struktur atau sistem (Ashworth et al., 2009). Apabila terdapat tekanan koersif melalui peraturan maka akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, dengan adanya peraturan bertujuan untuk mengatur praktik yang dijalankan agar dapat diterapkan dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa tekanan koersif terjadi ketika organisasi dipaksa untuk menerapkan regulasi dalam hal ini adalah undang-undang atau terjadinya tekanan dari organisasi lain. Hasil penelitian Ridha & Basuki (2019) dan Wulanda (2017) menyatakan bahwa tekanan eksternal yang mewakili isomorfisme koersif berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa peraturan dan masyarakat menjadi pendorong terjadinya transparansi pelaporan keuangan pemerintah, karena dengan adanya peraturan perundang-undangan pemerintah mampu memberikan transparansi keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H6 : Sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan antara tekanan koersif dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah

### **2.3.7 Pengaruh Tekanan Mimetik Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur sistem pengendalian internal pemerintah mengacu pada sistem pengendalian internal yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan yakni meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan (Yolanda, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febri et al., (2019) sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Sweetenia et al., (2019), Adeyemi & Olarewaju (2019), (Veronica et al., 2017), (Munzhedzi, 2016), (Pahala et al., 2016) (Aziz et al., 2015), (Kawatu & Kewo, 2019) yang juga memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini karena karena akuntabilitas keuangan suatu daerah akan terlaksana jika sistem pengendalian intern dalam instansi daerah berjalan dengan baik.

Salah satu bentuk teori isomorfisme instiusional adalah tekanan mimetik (Teo & Benbasat, 2003) dalam Perdana (2011). Tekanan mimetic memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku organisasi lain yang muncul sebagai respons

ketidakpastian pada suatu aturan tertentu. Ketidakpastian muncul karena berbagai hal dalam organisasi, misalnya perubahan kultur politik dalam pemerintahan, peraturan yang sering berubah-ubah, dan sebagainya. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu aturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam menerapkan peraturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa tindakan terbaik yang dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang dianggap berhasil (Ridha & Basuki, 2019). Pemerintah diharuskan untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyajikan informasi dengan jujur, dapat diuji kebenarannya, serta tidak berpihak kepada pihak tertentu, dimana hal ini sesuai dengan karakteristik kualitatif keterandalan (*reliability*) laporan keuangan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Hasil penelitian Ridha & Basuki (2019) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan yang mewakili tekanan mimetic tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan, sedangkan penelitian (Pradita et al., 2019) menyatakan bahwa ketidakpastian berpengaruh negative signifikan terhadap transparansi laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pergantian elit politik yang memaksa segala sesuatu yang telah diprogramkan pada kepemimpinan sebelumnya menjadi tidak terlaksana. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut:

H7 : Sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan antara tekanan mimetik dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah

### **2.3.8 Pengaruh Tekanan Normatif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur sistem pengendalian internal pemerintah mengacu pada sistem pengendalian internal yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan yakni meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan (Yolanda, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febri et al., (2019) sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penelitian oleh Sweetenia et al., (2019), Adeyemi & Olarewaju (2019), (Veronica et al., 2017), (Munzhedzi, 2016), (Pahala et al., 2016) (Aziz et al., 2015), (Kawatu & Kewo, 2019) yang juga memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini karena karena akuntabilitas keuangan suatu daerah akan terlaksana jika sistem pengendalian intern dalam instansi daerah berjalan dengan baik.

Dalam teori institusional organisasi cenderung untuk bertindak sama dengan organisasi lain. Faktor yang mempengaruhi organisasi melakukan hal tersebut yakni berasal internal organisasi dan lingkungan. Tekanan normatif muncul sebagai

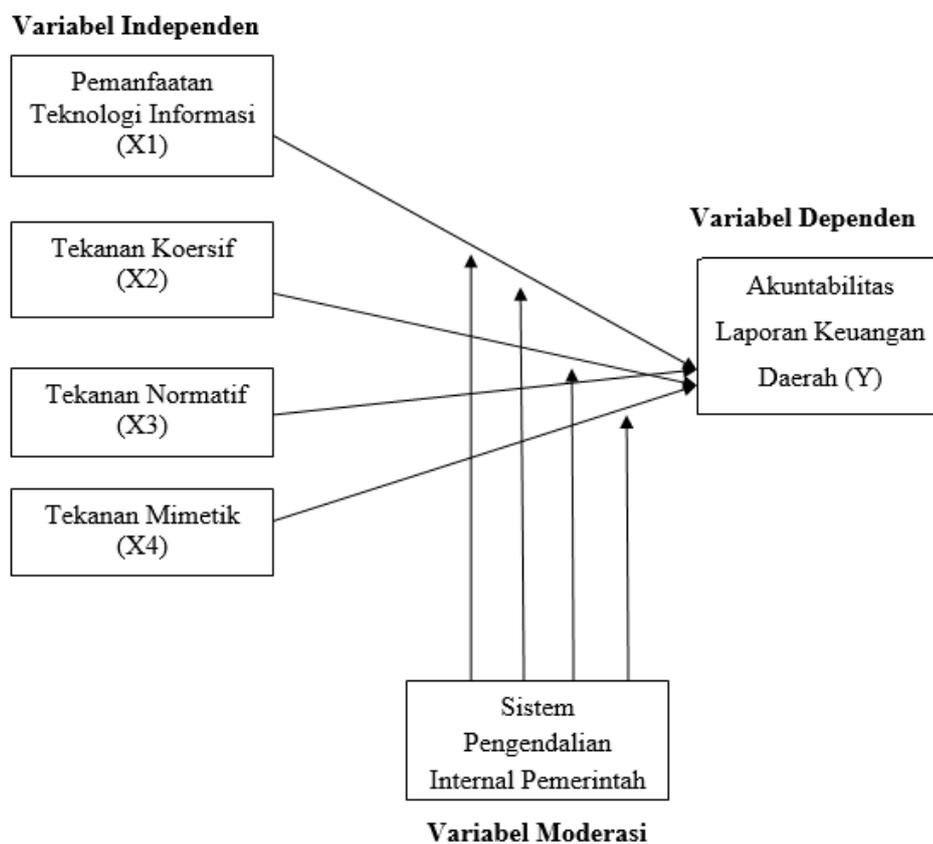
konsekuensi dari profesionalisme organisasi tertentu (DiMaggio & Powell, 1983). Menurut DiMaggio & Powell (1983) profesionalisme merupakan representasi secara kolektif oleh anggota dalam pekerjaan tertentu untuk menentukan cara-cara yang tepat dalam bertindak. Teori institusional ini menjelaskan bahwa individu dalam profesi tertentu menunjukkan norma-norma dan perilaku budaya yang terkait dengan pekerjaan mereka. Terdapat dua aspek tekanan normatif yakni: (1) latar belakang pendidikan formal, dan legitimasi berdasar aspek kognitif yang dihasilkan dari perguruan tinggi, dan (2) tingkat pertumbuhan dan pengaruh lembaga profesional yang memungkinkan praktek-praktek baru menyebar dengan cepat diseluruh organisasi (DiMaggio & Powell, 1983). Tekanan normatif dapat terjadi karena adanya tuntutan profesionalisme dalam bekerja guna meningkatkan pelayanan public. Keterlibatan organisasi pemerintah daerah yang profesional dan berintegritas dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel akan dapat tercapai jika para pegawai SKPD memiliki kemampuan yang andal dan kompeten terutama dalam bidang keuangan, sehingga mampu memenuhi standar profesionalisme pada setiap SKPD. Semakin kuat implementasi profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan dan prosedur organisasi tentu akan mendorong meningkatnya akuntabilitas.

Hasil penelitian Ridha & Basuki (2019) menyatakan bahwa komitmen manajemen yang mewakili tekanan normative berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Penelitian Indrayani et al. (2017) yang juga menggunakan teori institusional menyatakan bahwa komitmen manajemen

berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut:

H8 : Sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan antara tekanan normatif dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah

## 2.4 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran (2003) populasi adalah mengacu pada suatu kelompok yang terdiri dari orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Berdasarkan pengertian tersebut populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kota Manado, Sulawesi Utara yang terdiri dari Dinas, Inspektorat, Sekretariat, dan Badan.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih (Sekaran, 2003). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Metode *purposive sampling* dipilih karena informasi yang akan diambil berasal dari kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) kepala sub bagian keuangan dan staf dari setiap SKPD yang bekerja serta melaksanakan tugas dalam mengelola keuangan, 2) memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun atau lebih di SKPD, karena dianggap telah memiliki pengalaman mengenai situasi dan kondisi yang ada di dalam SKPD serta terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai akuntabilitas laporan keuangan.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Metode pengumpulan data yang akan digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner pada SKPD di Kota Manado.

### **3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel moderasi. Variabel dependen adalah akuntabilitas laporan keuangan daerah. Variabel independen adalah pemanfaatan teknologi informasi, tekanan koersif, tekanan mimetic, dan tekanan normative. Variabel moderasi adalah sistem pengendalian internal pemerintah.

#### **3.3.1 Variabel Dependen**

##### **3.3.1.1 Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas laporan keuangan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodic. Indikator untuk variabel akuntabilitas laporan keuangan diadaptasi dari indikator yang dikembangkan oleh (Karyadi, 2019) yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengukuran variabel ini diukur dengan model skala likert 1-5 yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju), dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju) (Angraini et al., 2016). Penilaian akuntabilitas laporan keuangan menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Superdi (2017) dan Fikrian et al. (2016).

### **3.3.2 Variabel Independen**

#### **3.3.2.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi terkait dengan (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat (Chodijah & Hidayah, 2018). Indikator yang digunakan untuk variabel ini diadaptasi dari indikator yang dikembangkan oleh (Karyadi, 2019) yaitu komputer dan jaringan internet.

Pengukuran variabel ini diukur dengan model skala likert 1-5 yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju), dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju) (Angraini et al., 2016). Penilaian pemanfaatan teknologi informasi menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Karyadi, 2019).

### 3.3.2.2 Tekanan Koersif

Tekanan koersif (*coercive isomorphism*) adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga untuk mengadopsi suatu struktur atau sistem (Ashworth et al., 2009). Indikator untuk variabel ini diadaptasi dari indikator yang dikembangkan oleh yaitu Ridha & Basuki (2019) yaitu:

1. Terbitnya undang-undang atau peraturan tentang akuntabilitas
2. Tuntutan pihak-pihak terkait
3. Tekanan media masa
4. Kritik dari masyarakat
5. Tuntutan pengusaha dan komunitas bisnis

Pengukuran variabel ini diukur dengan model skala likert 1-5 yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju), dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju) (Angraini et al., 2016). Penilaian tekanan koersif menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Ridha & Basuki, 2019)

### 3.3.2.3 Tekanan Mimetik

Tekanan mimetic (*mimetic isomorphism*) adalah tekanan yang timbul karena adanya kecenderungan untuk meniru perilaku organisasi lain yang dianggap telah berhasil dan muncul sebagai respons ketidakpastian pada suatu aturan tertentu. Ketidakpastian tersebut terjadi karena berbagai hal dalam organisasi, misalnya perubahan lingkungan kultur politik dalam pemerintahan, peraturan yang sering

berubah-ubah, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk variabel ini diadaptasi dari indikator yang dikembangkan oleh yaitu Ridha & Basuki (2019) yaitu:

1. Menjaga hubungan yang stabil dengan lingkungan dimana SKPD berada
2. Memperbaiki legitimasi SKPD
3. Menyediakan informasi keuangan
4. Menerapkan konsep akuntabilitas

Pengukuran variabel ini diukur dengan model skala likert 1-5 yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju), dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju) (Angraini et al., 2016). Penilaian tekanan mimetik menggunakan 4 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Ridha & Basuki, 2019).

#### **3.3.2.4 Tekanan Normatif**

Tekanan normative (*normative isomorphism*) adalah suatu proses perubahan dalam organisasi karena adanya tekanan profesionalisasi. Indikator yang digunakan untuk variabel ini diadaptasi dari indikator yang dikembangkan oleh yaitu Ridha & Basuki (2019) yaitu:

1. Membenahi kemampuan dan keterampilan pegawai
2. Memiliki pendidikan yang berkelanjutan
3. Membangun budaya etis
4. Kebutuhan SKPD

Pengukuran variabel ini diukur dengan model skala likert 1-5 yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju), dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju) (Angraini et al., 2016). Penilaian tekanan normatif menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Ridha & Basuki, 2019).

### **3.3.3 Variabel Moderasi**

#### **3.3.3.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator yang digunakan untuk variabel ini yaitu:

1. *Standard Operating Procedur* (SOP)
2. Penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008
3. Menggunakan dokumen/catatan yang memadai
4. Pemisahan wewenang
5. Tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran

Pengukuran variabel ini diukur dengan model skala likert 1-5 yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N =

Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju), dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju) (Angraini et al., 2016). Penilaian sistem pengendalian internal menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian Nurilah (2014).

### **3.4 Alat Statistik**

#### **3.4.1 Uji Kualitas Data**

##### **3.4.1.1 Uji Validitas**

Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Sekaran, 2003). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 21.

##### **3.4.1.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas atau keandalan pengukuran dibuktikan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan seberapa baik item-item yang mengukur sebuah konsep bersatu menjadi sebuah kumpulan. *Alfa cronbach* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. *Alfa cronbach* dihitung dalam hal rata-rata interkorelasi antar-item yang mengukur konsep. Semakin dekat *alfa Cronbach* dengan 1, maka semakin tinggi keandalan konsistensi internal (Sekaran, 2003).

Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Pengujian

terhadap reliabilitas kuesioner dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha*. Nilai batas yang digunakan untuk menentukan reliabilitas tidaknya suatu kuesioner adalah 0,6. Dengan demikian, jika suatu kuesioner memiliki koefisien reliabilitas *Cronbach Alpha* > 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliable, sehingga layak digunakan dalam penelitian sebagai alat pengumpulan data.

### 3.4.2 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang bertujuan untuk menguji apakah sistem pengendalian internal pemerintah dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, tekanan koersif, tekanan mimetic dan terkanan normative terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA):

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 (X_1 \cdot X_5) + \beta_6 (X_2 \cdot X_5) + \beta_7 (X_3 \cdot X_5) + \beta_8 (X_4 \cdot X_5) + e$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Laporan Keuangan
- a : Konstanta
- $\beta_1$ -8 : Koefisien regresi
- X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi
- X2 : Tekanan Koersif
- X3 : Tekanan Mimetik
- X4 : Tekanan Normatif
- X5 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- e : Error

### 3.4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.4.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model uji regresi yang baik selanjutnya tidak terjadi multikolinieritas. Dalam penelitian ini, gejala multikolinieritas dilihat dari: a) jika nilai Tolerance  $> 0,10$  maka artinya tidak terjadi multikolinieritas, b) jika Variance Inflation Factor (VIF)  $> 0,10$  maka artinya terjadi multikolinieritas (Rahayu et al., 2014).

#### 3.4.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregresikan variabel independen terhadap nilai *Absolute residual*. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Sari, 2017).

#### 3.4.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas atau sig. lebih besar dari taraf signifikan 5% ( $p\text{-value} > 0,05$ ) (Rahayu et al., 2014).

### **3.5 Pengujian Hipotesis**

#### **3.5.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Ho1 :  $\beta_1 \leq 0$ : Pengaruh Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

HA1 :  $\beta_1 > 0$ : Pengaruh Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### **3.5.2 Tekanan Koersif**

Ho2 :  $\beta_2 \leq 0$ : Pengaruh Tekanan Koersif tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

HA2 :  $\beta_2 > 0$ : Pengaruh Tekanan Koersif berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### **3.5.3 Tekanan Mimetik**

Ho3:  $\beta_3 \leq 0$ : Pengaruh Tekanan Mimetik tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

HA3 :  $\beta_3 > 0$ : Pengaruh Tekanan Mimetik berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### **3.5.4 Tekanan Normatif**

Ho4 :  $\beta_4 \leq 0$ : Pengaruh Tekanan Normatif tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

HA4 :  $\beta_4 > 0$ : Pengaruh Tekanan Normatif berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### 3.5.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Ho5 :  $\beta_5 \leq 0$ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

HA5 :  $\beta_5 > 0$ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ho6 :  $\beta_6 \leq 0$ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Tekanan Koersif dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

HA6 :  $\beta_6 \leq 0$ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap hubungan Tekanan Koersif dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ho7 :  $\beta_7 \leq 0$ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Tekanan Mimetik dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

HA7 :  $\beta_7 \leq 0$ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap hubungan Tekanan Mimetik dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ho8 :  $\beta_8 \leq 0$ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Tekanan Normatif dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

HA8 :  $\beta_8 \leq 0$ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap hubungan Tekanan Normatif dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan dalam bab tiga, yaitu data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan cara diberikan langsung kepada pegawai bagian keuangan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Manado sebanyak 141 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan melakukan proses perizinan ke Sekretariat Daerah Kota Manado serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado dengan memberikan surat izin penelitian dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia beserta kuesioner yang telah dibuat peneliti. Surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah digunakan untuk mengantarkan kuesioner saat disebarkan oleh peneliti. Proses perizinan hingga penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 18 Januari – 9 Februari 2021. Berikut ini ringkasan hasil pengumpulan data.

**Tabel 4.1**

#### Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	141	100%
Kuesioner yang kembali	130	92%
Kuesioner yang tidak kembali	11	8%
Kuesioner yang memenuhi syarat	124	88%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	6	4%

*Sumber : Hasil penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kuesioner yang telah disebar yaitu sebesar 92% dan hasil kuesioner yang memenuhi syarat untuk diolah yaitu sebesar 88%.

#### 4.2 Deskripsi Responden

Berdasarkan jawaban hasil kuesioner diperoleh demografi responden mengenai identitas umum pegawai pemerintah daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Rekapitulasi Responden**

<b>Data Deskriptif</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	Laki-laki	52	41,9%
	Perempuan	72	58,1%
<b>Umur</b>	< 20 tahun	0	0%
	20 – 35 tahun	48	38,7%
	36 – 50 tahun	56	45,2%
	> 50 tahun	20	16,1%
<b>Pendidikan Terakhir</b>	SMA	26	21,0%
	D3	6	4,8%
	S1	82	66,1%
	S2	10	8,1%
	S3	0	0%
	Lainnya	0	0%
<b>Lama Bekerja</b>	1 – 5 tahun	42	33,9%
	6 – 10 tahun	18	14,5%
	> 10 tahun	64	51,6%

*Sumber : Hasil penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil bahwa jenis kelamin responden terbanyak adalah perempuan yakni 72 atau sebesar 58,1% dari total responden. Berdasarkan umur, mayoritas responden berusia 36 – 50 tahun atau sebesar 45,2% dari total responden. Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir, sebagian besar responden adalah S1 (Sarjana) yang artinya bahwa responden memiliki ilmu dan keahlian yang cukup tinggi yakni sebesar 66,1%. Berdasarkan lama bekerja yang lebih banyak dipilih adalah lebih dari 10 tahun atau sebesar 51,6% dari total responden yang menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman yang cukup baik dalam hal laporan keuangan instansi pemerintah serta telah mengalami perubahan kebijakan.

## **4.2 Uji Kualitas Data**

### **4.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur keakuratan dan ketepatan informasi data dalam penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *software SPSS* dengan sampel berjumlah 124 responden. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel pada *degree of freedom* ( $df$ ) =  $(N-2)$ , dimana  $N$  merupakan jumlah sampel. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah 124, sehingga perhitungan nilai  $df$  =  $(124-2) = 122$  maka diperoleh nilai  $df$  yaitu 122. Dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  (0,05) maka didapat nilai  $r$  tabel adalah 0,176. Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka data hasil penelitian adalah valid dan sebaliknya. Ringkasan hasil uji validitas adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Item</b>	<b>Pearson Correlation</b>	<b>Sig.</b>	<b>r table</b>	<b>Keterangan</b>
Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	ALK_1	0,854	0,000	0,1750	Valid
	ALK_2	0,788	0,000	0,1750	Valid
	ALK_3	0,852	0,000	0,1750	Valid
	ALK_4	0,845	0,000	0,1750	Valid
	ALK_5	0,765	0,000	0,1750	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	PTI_1	0,675	0,000	0,1750	Valid
	PTI_2	0,851	0,000	0,1750	Valid
	PTI_3	0,533	0,000	0,1750	Valid
	PTI_4	0,738	0,000	0,1750	Valid
	PTI_5	0,772	0,000	0,1750	Valid
Tekanan Koersif (X2)	TK_1	0,646	0,000	0,1750	Valid
	TK_2	0,747	0,000	0,1750	Valid
	TK_3	0,720	0,000	0,1750	Valid
	TK_4	0,743	0,000	0,1750	Valid
Tekanan Mimetik (X3)	TM_1	0,546	0,000	0,1750	Valid
	TM_2	0,669	0,000	0,1750	Valid
	TM_3	0,784	0,000	0,1750	Valid
	TM_4	0,762	0,000	0,1750	Valid
Tekanan Normatif (X4)	TN_1	0,756	0,000	0,1750	Valid
	TN_2	0,721	0,000	0,1750	Valid
	TN_3	0,685	0,000	0,1750	Valid
	TN_4	0,681	0,000	0,1750	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X5)	SPIP_1	0,763	0,000	0,1750	Valid
	SPIP_2	0,785	0,000	0,1750	Valid
	SPIP_3	0,735	0,000	0,1750	Valid

	SPIP_4	0,814	0,000	0,1750	Valid
	SPIP_5	0,813	0,000	0,1750	Valid

*Sumber : Hasil penelitian, 2021*

Berdasarkan ringkasan uji validitas pada tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan variabel penelitian menghasilkan nilai koefisien korelasi yang lebih besar dari r tabel (0,1750) sehingga seluruh item pertanyaan variabel dalam penelitian ini adalah valid.

#### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha* yang diuji melalui bantuan *software* statistik yaitu SPSS. Dalam uji reliabilitas suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Hasil uji reliabilitas yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y)	5	0,878	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	5	0,751	Reliabel
Tekanan Koersif (X2)	4	0,676	Reliabel
Tekanan Mimetik (X3)	4	0,609	Reliabel
Tekanan Normatif (X4)	4	0,671	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X5)	5	0,836	Reliabel

*Sumber : Hasil penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner adalah reliabel, sehingga layak digunakan dalam penelitian sebagai alat pengumpulan data.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian. Multikolinieritas dapat dilihat pada nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas, dan jika *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	0,466	2.144
Tekanan Koersif (X2)	0,480	2.083
Tekanan Mimetik (X3)	0,523	1.914
Tekanan Normatif (X4)	0,662	1.511
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X5)	0,429	2.331

*Sumber : Hasil penelitian, 2021*

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.7 diketahui variabel X1 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,498 dan VIF sebesar 2,008, variabel X2 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,620 dan VIF sebesar 1,614, variabel X3 dengan nilai

tolerance sebesar 0,464 dan VIF sebesar 2,154, variabel X4 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,636 dan VIF sebesar 1,574, dan variabel X5 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,367 dan VIF sebesar 2,725. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen dikarenakan memiliki nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ .

#### 4.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregresikan variabel independen terhadap nilai *Absolute residual*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Sari, 2017). Berikut ini merupakan hasil uji *glejser*.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Nilai Sig.
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	0,608
Tekanan Koersif (X2)	0,289
Tekanan Mimetik (X3)	0,410
Tekanan Normatif (X4)	0,607
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X5)	0,965

*Sumber : Hasil penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel 4.6 setiap variabel memperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

### 4.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian menghasilkan data distribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas dalam penelitian menggunakan *one sample kolmogrov-smirnov test* dimana data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas atau sig. lebih besar dari taraf signifikan 5% ( $p\text{-value} > 0,05$ ) (Rahayu et al., 2014).

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Normalitas**

	<b>Unstandardized Residual</b>
N	124
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,080

*Sumber : Hasil penelitian, 2021*

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada tabel 4.7 diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,080 dimana lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ) sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## 4.4 Analisis Regresi Linier

### 4.4.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil pengujian regresi dengan pemanfaatan teknologi informasi, tekanan koersif, tekanan mimetik, tekanan normatif sebagai variabel independen dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constants)	.981	.434		2.258	.026
X1	.374	.094	.347	3.954	.000
X2	.218	.089	.228	2.455	.016
X3	.027	.116	.022	.229	.819
X4	.185	.091	.176	2.032	.044

*Sumber : Hasil penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,981 + 0,374 X1 + 0,218 X2 + 0,027 X3 + 0,185 X4$$

Nilai konstanta dan koefisien regresi dari persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,981 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen diasumsikan adalah 0, maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah bernilai sebesar 0,981.
2. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,374 yang berarti bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,374.

3. Koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,218 yang berarti bahwa variabel tekanan koersif berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan koersif meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,218.
4. Koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,027 yang berarti bahwa variabel tekanan mimetik bernilai positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan mimetik meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,027.
5. Koefisien regresi variabel X4 sebesar 0,185 yang berarti bahwa variabel tekanan normatif berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan normatif meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,185.

#### **4.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda**

Pengujian analisis regresi linier berganda menggunakan model *Moderated Regression Analysis (MRA)* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderating. MRA sendiri adalah analisis regresi linear berganda dimana persamaannya mengandung perkalian antara dua atau lebih variabel independen. Berikut ini hasil uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constants)	2.711	5.070		.535	.594
X1	-2.034	1.123	-1.891	-1.811	.073
X2	1.409	.964	1.472	1.462	.147
X3	-.181	1.285	-.152	-.141	.888
X4	.796	1.126	.755	.707	.481
X5	.005	1.197	.004	.004	.997
Moderasi X1.X5	.513	.255	3.560	2.013	.047
Moderasi X2.X5	-.280	.222	-1.953	-1.258	.211
Moderasi X3.X5	.029	.291	.191	.099	.921
Moderasi X4.X5	-.168	.267	-1.137	-.627	.532

*Sumber : Hasil penelitian, 2021*

Keterangan: X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi

X2 : Tekanan Koersif

X3 : Tekanan Mimetik

X4 : Tekanan Normatif

X5 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,711 - 2,034 X1 + 1,409 X2 - 0,181 X3 + 0,796 X4 + 0,005 X5 + 0,513 (X1.X5) - 0,280 (X2.X5) + 0,029 (X3.X5) - 0,168 (X4.X5)$$

Dari hasil persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta sebesar 2,711 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen diasumsikan adalah 0, maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah bernilai sebesar 2,711.
2. Koefisien regresi moderasi  $X1.X5$  sebesar 0,513 bernilai positif yang menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan interaksi antara pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem pengendalian internal pemerintah maka akan terjadi kenaikan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,513.
3. Koefisien regresi moderasi  $X2.X5$  sebesar 0,280 bernilai negatif yang menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan interaksi antara tekanan koersif dengan sistem pengendalian internal pemerintah maka akan terjadi penurunan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,280.
4. Koefisien regresi moderasi  $X3.X5$  sebesar 0,029 bernilai positif yang menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan interaksi antara tekanan mimetik dengan sistem pengendalian internal pemerintah maka akan terjadi kenaikan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,029.
5. Koefisien regresi moderasi  $X4.X5$  sebesar 0,168 bernilai negatif yang menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan interaksi antara tekanan normatif dengan sistem pengendalian internal pemerintah maka akan terjadi penurunan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,168.

## 4.5 Pengujian Hipotesis

### 4.5.1 Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini adalah 0,05 ( $\alpha$ ). Hasil pengolahan uji t dapat dilihat pada tabel 4.8 dan tabel 4.9. Adapun interpretasi uji t dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, dimana T tabel didapat dari penghitungan *degree of freedom* ( $df$ ) =  $N - K$ , dengan N merupakan jumlah responden dan k merupakan jumlah variabel baik itu variabel bebas dan terikat. Pada penelitian ini jumlah responden yang digunakan adalah 124, sehingga perhitungan nilai  $df = 124 - 6 = 118$  maka diperoleh nilai  $df$  yaitu 118. Sehingga untuk penelitian satu arah dengan alpha ( $\alpha$ ) 5%, untuk baris 118 ditemukan nilai 1,658. Jika nilai T hitung lebih tinggi daripada nilai T tabel ( $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ ), maka hal tersebut dapat membuktikan adanya pengaruh antar variabel yang diuji.

Berikut ini merupakan pembahasan untuk setiap hipotesis.

- a. H1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.8, dimana variabel pemanfaatan teknologi informasi memperoleh nilai signifikansi 0,000 yang mana kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan T hitung bernilai positif sebesar 3,954 lebih besar dari T tabel 1,658 pada tingkat signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak

dan H1 diterima, dengan kata lain Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- b. H2 : Tekanan Koersif berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.8, dimana variabel tekanan koersif memperoleh nilai signifikansi 0,016 yang mana kurang dari 0,05 ( $0,016 < 0,05$ ) dan T hitung bernilai positif sebesar 2.455 lebih besar dari T tabel 1,658 pada tingkat signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima, dengan kata lain Tekanan Koersif berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- c. H3 : Tekanan Mimetik berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.8, dimana variabel tekanan mimetic memperoleh nilai signifikansi 0,819 yang mana lebih dari 0,05 ( $0,819 > 0,05$ ) dan T hitung bernilai positif sebesar 0,229 lebih kecil dari T tabel 1,658 pada tingkat signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tekanan mimetik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan H4 ditolak.

- d. H4 : Tekanan Normatif berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.8, dimana variabel tekanan normatif memperoleh nilai signifikansi 0,044 yang mana kurang dari 0,05 ( $0,044 < 0,05$ ) dan T hitung bernilai positif sebesar 2,032 lebih besar dari T tabel 1,658 pada tingkat signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tekanan normatif berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima.

- e.  $H_5$  : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis 5 dapat dilihat pada tabel 4.9, dimana variabel moderasi  $X_1.X_5$  menunjukkan nilai signifikansi 0,047 yang mana kurang dari 0,05 ( $0,047 < 0,05$ ) dan T hitung bernilai positif sebesar 2,013 lebih besar dari T tabel 1,658 pada tingkat signifikan 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah bukan merupakan pemoderasi dalam hubungan antara tekanan normatif dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima.

- f.  $H_6$  : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap hubungan Tekanan Koersif dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis 6 dapat dilihat pada tabel 4.9, dimana variabel moderasi  $X_2.X_5$  menunjukkan nilai signifikansi 0,211 dimana lebih dari 0,05 ( $0,211 >$

0,05) dan T hitung bernilai negatif sebesar 1,258 lebih kecil dari T tabel 1,658 pada tingkat signifikan 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah bukan merupakan pemoderasi dalam hubungan antara tekanan koersif dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H6 ditolak.

- g. H7 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap hubungan Tekanan Mimetik dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis 7 dapat dilihat pada tabel 4.9, dimana variabel moderasi X3.X5 menunjukkan nilai signifikansi 0,921 dimana lebih dari 0,05 ( $0,921 > 0,05$ ) dan T hitung bernilai positif sebesar 0,099 lebih kecil dari T tabel 1,658 pada tingkat signifikan 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah bukan merupakan pemoderasi dalam hubungan antara tekanan mimetik dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H7 ditolak.

- h. H8 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap hubungan Tekanan Normatif dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis 7 dapat dilihat pada tabel 4.9, dimana variabel moderasi X4.X5 menunjukkan nilai signifikansi 0,532 yang mana lebih dari 0,05 ( $0,532 > 0,05$ ) dan T hitung bernilai negatif sebesar 0,627 lebih kecil dari T tabel 1,658 pada tingkat signifikan 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel sistem pengendalian

internal pemerintah bukan merupakan pemoderasi dalam hubungan antara tekanan normatif dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H8 ditolak.

## **4.6 Pembahasan**

### **4.6.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil hipotesis pertama (H1) dapat diamati pada tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah karena memperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.

Penilaian pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari beberapa indikator, yaitu komputer dan jaringan internet. Pegawai SKPD Kota Manado telah mampu melakukan pengelolaan keuangan melalui komputer untuk memasukkan data transaksi guna menghasilkan suatu laporan keuangan. Selain itu para pegawai juga menggunakan jaringan internet untuk mempublikasikan laporan keuangan serta sebagai penghubung untuk pengiriman informasi yang dibutuhkan. Melalui adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah daerah mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori *stakeholder* dimana masyarakat selaku *stakeholder* atau pemangku kepentingan memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan pertanggungjawaban organisasi pemerintah daerah dalam hal sumber daya keuangan. Teori *stakeholder* berkaitan dengan usaha organisasi dalam menjalin hubungan baik antara *stakeholder* sehingga dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap organisasi dengan mengungkapkan laporan keuangan kepada publik. Pemerintah daerah tentunya akan memiliki transaksi keuangan yang kompleks, sehingga dengan adanya teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Haza (2019) dan Chodijah & Hidayah (2018) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4.6.2 Pengaruh Tekanan Koersif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil hipotesis kedua (H2) dapat diamati pada tabel 4.8 dimana memperoleh nilai signifikansi 0,016 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,016 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa tekanan koersif berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga H0 ditolak dan H2 diterima.

Penilaian tekanan koersif terdiri dari beberapa indikator, yaitu terbitnya undang-undang atau peraturan pemerintah tentang akuntabilitas, tekanan dari media

massa, dan kritik dari masyarakat. DiMaggio & Powell (1983) menjelaskan isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*) merupakan tekanan formal dan informal yang diterima organisasi, dimana suatu organisasi berada dalam tekanan yang diharuskan untuk patuh pada aturan dalam mencapai tujuan. Tekanan koersif muncul akibat tekanan dari pihak luar seperti Undang-Undang atau kritik dari masyarakat maupun sanksi-sanksi yang diberikan jika peraturan tersebut tidak diterapkan. Adanya tekanan koersif juga membuat seluruh anggota organisasi melaksanakan proses kegiatan operasional dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan hasil kuesioner responden, pegawai SKPD menunjukkan telah mengadopsi dan menerapkan peraturan pemerintah, sehingga tekanan atau dorongan dari pihak tertentu dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian Ridha & Basuki (2019) dan Wulanda (2017) yang membuktikan bahwa tekanan eksternal yang mewakili isomorfisme koersif berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah.

#### **4.6.3 Pengaruh Tekanan Mimetik terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil hipotesis ketiga (H3) dapat diamati pada tabel 4.8 dimana memperoleh nilai signifikansi 0,819 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,819 > 0,05$ ). Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa tekanan mimetik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian tekanan mimetik pada pegawai SKPD seperti menjaga hubungan yang stabil dengan lingkungan, memperbaiki legitimasi SKPD, menyediakan informasi keuangan, dan menerapkan

konsep akuntabilitas. Dalam praktiknya SKPD berusaha untuk menjaga legitimasi terhadap para pemangku kepentingan, serta apabila terdapat perubahan peraturan pada struktur pemerintahan maka SKPD mempelajari peraturan tersebut didalam internal organisasi sendiri. Berdasarkan teori institusional, tekanan mimetik memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku organisasi lain yang muncul sebagai reaksi ketidakpastian pada suatu aturan tertentu, misal terjadinya perubahan peraturan pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksiapan organisasi dalam memahami dan menerapkan praktik peraturan yang baru. Pegawai SKPD menganggap bahwa tekanan mimetik bukan merupakan tekanan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, melainkan bahwa akuntabilitas telah menjadi suatu kewajiban bagi organisasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Ridha & Basuki (2019) dan Indrayani et al. (2017) yang menyatakan bahwa tekanan mimetik berupa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

#### **4.6.4 Pengaruh Tekanan Normatif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil hipotesis keempat (H4) dapat diamati pada tabel 4.8 dimana memperoleh nilai signifikansi 0,044 yang kurang dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,044 < 0,05$ ). Dapat disimpulkan bahwa tekanan normatif berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa jika tekanan normatif meningkat maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan cenderung meningkat.

Penilaian tekanan normatif terdiri dari beberapa indikator, yaitu kemampuan dan pengetahuan pegawai, dan sikap pegawai dalam membangun budaya etis. Kemampuan dan pengetahuan pegawai dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, sedangkan sikap dalam membangun budaya etis dapat dilihat berdasarkan keterampilan pegawai untuk berperilaku dan beretika yang baik dalam organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya tekanan normatif seperti profesionalitas, integritas dan komitmen manajemen yang tinggi terhadap akuntabilitas laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban SKPD kepada pemangku kepentingan. Semakin baik implementasi tekanan normatif untuk membangun budaya etis dalam organisasi juga akan mendorong akuntabilitas laporan keuangan instansi pemerintah dalam memberikan informasi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ridha & Basuki (2019), Pradita et al. (2019), Indrayani et al. (2017) yang menunjukkan bahwa tekanan normatif yang berupa komitmen manajemen berpengaruh terhadap terhadap transparansi pelaporan keuangan.

#### **4.6.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Hubungan Antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil hipotesis kelima (H5) dapat dilihat pada tabel 4.9 dimana memperoleh nilai signifikansi 0.047 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,047 < 0,05$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi

informasi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dimoderasi sistem pengendalian internal pemerintah.

Penilaian sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa indikator, yaitu *Standard Operating Procedur* (SOP), penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008, penggunaan dokumen atau catatan yang memadai, pemisahan wewenang, dan tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran. Pegawai pemerintah daerah telah melakukan tugasnya yakni penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SOP, menerapkan sistem pengendalian internal guna mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan, dan menggunakan dokumen atau catatan yang memadai, serta adanya pemisahan wewenang pada suatu kegiatan atau transaksi tertentu. Sedangkan untuk penilaian pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari beberapa indikator, yaitu komputer dan jaringan internet. Pegawai SKPD Kota Manado telah mampu melakukan pengelolaan keuangan melalui komputer untuk memasukkan data transaksi guna menghasilkan suatu laporan keuangan. Selain itu para pegawai juga menggunakan jaringan internet untuk mempublikasikan laporan keuangan serta sebagai penghubung untuk pengiriman informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dengan diterapkannya sistem pengendalian internal pemerintah dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk tercapainya pengelolaan, pemantauan mutu informasi, dan untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat untuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Maka dari itu, dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah

yang diterapkan dengan efektif, pemerintah mampu mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Haza (2019) dan Chodijah & Hidayah (2018) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap terhadap kualitas pelaporan keuangan.

#### **4.6.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Hubungan Antara Tekanan Koersif dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil hipotesis keenam (H6) dapat dilihat pada tabel 4.9 dimana menunjukkan nilai signifikansi 0,211 yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,211 > 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak dapat memoderasi hubungan antara tekanan koersif dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penilaian sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa indikator, yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP), penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008, penggunaan dokumen atau catatan yang memadai, pemisahan wewenang, dan tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan pada SKPD yang terkait ditemukan bahwa instansi pemerintah daerah menerapkan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Sedangkan penilaian tekanan koersif terdiri dari beberapa indikator, yaitu terbitnya undang-undang atau peraturan pemerintah tentang akuntabilitas, tekanan dari media massa, dan kritik dari masyarakat.

Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (*good governance*). Sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah untuk taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Namun hasil pengujian penelitian ini mengindikasikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah sebagai pemoderasi tidak menjamin pengaruh tekanan koersif dari luar organisasi pada SKPD pemerintah Kota Manado akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, artinya tekanan dari luar organisasi misalnya peraturan pemerintah atau tekanan dari masyarakat belum mampu meningkatkan pemahaman organisasi dalam menerapkan peraturan yang baru, sehingga berakibat pada akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Davici (2018) yang menunjukkan bahwa tekanan koersif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi laporan keuangan. Namun jika dilihat dari aspek teori institusional hal ini bertentangan dengan teori tersebut, dikarenakan dengan adanya suatu peraturan seharusnya dapat membuat organisasi melaksanakan kegiatan operasional selayaknya.

#### **4.6.7 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Hubungan Antara Tekanan Mimetik dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7) dapat dilihat pada tabel 4.9 dimana memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,921 yang lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  ( $0,921 > 0,05$ ). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap hubungan tekanan mimetik dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak dapat memoderasi hubungan antara tekanan mimetik dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tekanan mimetik adalah tekanan dimana organisasi mengalami ketidakpastian yang disebabkan adanya pengaruh dari luar organisasi misal terjadinya perubahan peraturan. Hal tersebut akan berdampak pada sulitnya SKPD untuk menerapkan peraturan yang baru. Penilaian tekanan mimetik pada pegawai SKPD seperti menjaga hubungan yang stabil dengan lingkungan, memperbaiki legitimasi SKPD, menyediakan informasi keuangan, dan menerapkan konsep akuntabilitas. Berdasarkan hasil kuesioner responden pada pegawai SKPD Kota Manado, kendala terhadap peraturan yang baru tidak menyebabkan organisasi untuk meniru organisasi lain, melainkan SKPD berusaha untuk mempelajari peraturan tersebut didalam internal organisasi sendiri. Sedangkan penilaian sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa indikator, yaitu *Standard Operating Procedur* (SOP), penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008, penggunaan

dokumen atau catatan yang memadai, pemisahan wewenang, dan tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran. Penerapan sistem pengendalian internal yang memadai menjadi tolak ukur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketidamampuan sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi tekanan mimetik terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kemungkinan adalah karena SKPD beranggapan bahwa tekanan mimetik bukan merupakan tekanan untuk mendorong akuntabilitas keuangan, tetapi akuntabilitas laporan keuangan adalah suatu kewajiban bagi organisasi untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada publik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Ridha & Basuki (2019) dan Indrayani et al. (2017) membuktikan bahwa tekanan mimetik tidak berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah.

#### **4.6.8 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Memoderasi Hubungan Antara Tekanan Normatif dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian hipotesis ke delapan (H8) dapat dilihat pada tabel 4.9 yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,532 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  ( $0,532 > 0,05$ ). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap hubungan tekanan normatif dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak

mampu memoderasi hubungan antara tekanan normatif dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penilaian tekanan normatif terdiri dari beberapa indikator, yaitu kemampuan dan pengetahuan pegawai, serta sikap pegawai dalam membangun budaya etis. Kemampuan dan pengetahuan pegawai dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, sedangkan sikap dalam membangun budaya etis dapat dilihat berdasarkan pada bagaimana pegawai berperilaku dan beretika yang baik dalam organisasi sehingga mengetahui batasan-batasan dalam bekerja. Adapun penilaian sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa indikator, yaitu *Standard Operating Procedur (SOP)*, penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008, penggunaan dokumen atau catatan yang memadai, pemisahan wewenang, dan tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran. Berdasarkan temuan pada penelitian ini sistem pengendalian internal pemerintah tidak memperkuat pengaruh tekanan normatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah karena loyalitas para pegawai SKPD Kota Manado dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih rendah. Terbitnya peraturan tentang akuntabilitas laporan keuangan hanya sebagai pendorong, artinya penerapan akuntabilitas laporan keuangan membutuhkan komitmen dari manajemen SKPD untuk dapat memahami dan menyesuaikan praktiknya dengan peraturan yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purnamasari & Handayani (2015) yang menyatakan bahwa tekanan normatif yang berupa komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, faktor-faktor institusional yang terdiri dari tekanan koersif, tekanan mimetik, dan tekanan normatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah staf keuangan pada SKPD di Kota Manado. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut.

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena para pegawai SKPD telah mampu menggunakan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan.
2. Tekanan koersif berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena tekanan yang muncul dari luar organisasi seperti peraturan pemerintah, tekanan dari masyarakat atau pihak tertentu dapat mendorong untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah

3. Tekanan mimetik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pegawai SKPD menganggap bahwa tekanan mimetik bukan merupakan tekanan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, melainkan bahwa akuntabilitas telah menjadi suatu kewajiban bagi organisasi.
4. Tekanan normatif berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena dengan adanya tekanan normatif seperti profesionalitas, integritas dan komitmen manajemen yang tinggi akan mendorong akuntabilitas laporan keuangan instansi pemerintah dalam memberikan informasi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan.
5. Sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara tekanan koersif dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7. Sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara tekanan mimetik dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara tekanan normatif dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 5.2 Implikasi Penelitian

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran atau masukan kepada pemerintah daerah, khususnya bagi pimpinan masing-masing SKPD Kota Manado bahwa terdapat sejumlah pertimbangan antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi karena melalui adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah daerah mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencapai tata kelola organisasi terutama pada kegiatan operasional pegawai di bidang keuangan.
- b. Tekanan koersif dapat mendorong organisasi pemerintah daerah untuk patuh dan taat dalam menerapkan peraturan pemerintah misalnya Undang-Undang guna meningkatkan akuntabilitas dengan menyajikan laporan keuangan agar dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan.
- c. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai di bidang keuangan seperti melakukan pelatihan terkait pengelolaan keuangan pada setiap instansi.
- d. Mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada masing-masing SKPD dengan tujuan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

## 2. Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD yang tentunya memiliki jadwal yang padat, hal ini mengakibatkan terbatasnya waktu dalam pengisian kuesioner dimana terdapat beberapa kuesioner yang tidak memenuhi syarat dan beberapa kuesioner tidak kembali sehingga data tidak dapat diolah.
2. Variabel pada penelitian lebih memfokuskan pada variabel independen yang terdiri dari pemanfaatan teknologi informasi, tekanan koersif, tekanan mimetik, tekanan normatif, dan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada pemerintah daerah Kota Manado, sehingga tidak menjelaskan secara umum terkait akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pada tingkat nasional.

#### 5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran dari penulis yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel independen lain yang akan diteliti.
2. Proses pengumpulan data yang berupa penyebaran kuesioner, diusahakan dijelaskan secara langsung kepada responden terkait pengisian kuesioner tersebut agar responden dapat menjawab seluruh item pertanyaan sehingga meminimalisir data kuesioner yang tidak dapat diolah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian pada daerah yang lebih luas.

## DAFTAR REFERENSI

- Adebayo, A. V., & Ilesanmi, K. D. (2020). Financial resource management in the Nigerian public sector: Policy measures to address loopholes. *Problems and Perspectives in Management*, 18(2), 329–339. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(2\).2020.27](https://doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.27)
- Adeyemi, F., & Olarewaju, O. (2019). Internal Control System And Financial Accountability : An Investigation Of Nigerian South-Western Public Sector. *Acta Universitatis Danubius. Œconomica*, 15(1), 134–150.
- Agyenim-Boateng, C., Stafford, A., & Stapleton, P. (2017). The role of structure in manipulating PPP accountability. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 30(1), 119–144. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2014-1590>
- Ahrens, T., & Ferry, L. (2015). Newcastle city council and the grassroots: Accountability and budgeting under austerity. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 28(6), 909–933. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2014-1658>
- Akinyele, A. E. (2016). Financial Control and Accountability in the Public Sector. *International Journal of Arts & Sciences*, 09(02), 301–324.
- Al-shbail, T., & Aman, A. (2018). *E-government and accountability: How to mitigate the disorders and dysfunctions of accountability relationships*. 12(2), 155–190. <https://doi.org/10.1108/TG-09-2017-0057>
- Angraini, D., Agusti, R., & Anggraini, L. (2016). PENGARUH PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI, AKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1178–1189.
- Ani, K., & Arifin, J. (2016). *ANALISIS PENGARUH FAKTOR INSTITUSIONAL TERHADAP MINAT ADOPSI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH*.
- Anselmi, L., Zarone, V., & Brunelli, S. (2017). An Evolutionary Transparency Approach to Public Accountability. *Symphonya. Emerging Issues in Management*, 2, 103. <https://doi.org/10.4468/2017.2.11anselmi.zarone.brunelli>
- Arfianty, A., & Virlayani, A. (2017). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dan Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), 80–90. <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.205>

- Asfiryati, D. (2017). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada SKPD Kota Dumai). *JOM Fekon*, 4(1), 7.
- Ashworth, R., Boyne, G., & Delbridge, R. (2009). Escape from the iron cage? Organizational change and isomorphic pressures in the public sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(1), 165–187. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum038>
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinant factors influencing the accountability of village financial management. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(1), 1–10.
- Awalia, R. (2017). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar Tahun 2017). *JOM Fekon*, 4(2), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 163–169. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5)
- Bakar, N. B. A., & Ismail, S. (2011). Financial Management Accountability Index (FMAI) in the Malaysian public sector: A way forward. *International Review of Administrative Sciences*, 77(1), 159–190. <https://doi.org/10.1177/0020852310390281>
- Baker, D., & Chin, R. (2016). E-Availability and E-Accessibility of Financial Documents: A Cross-State Examination of US County Websites. *The Electronic Journal of E-Government*, 14(1), 73–86. <http://www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=446>
- Barizah, N., Bakar, A., & Saleh, Z. (2016). *Disclosure of Accountability Information in Public Sector: The Case of Malaysian Federal Statutory Bodies. March*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n2p158>
- Basuki, A. F., Setyowati, K., & Wahyunengseh, R. D. (2019). Accountability Model of Financial Management in the Public Sector: A Study on Panggungharjo Village Budget. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 26(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v26i1.10312>
- Bowrey, G. (2007). Have Recent Financial Reforms Improved Financial

- Accountability in the Australian Commonwealth Public Sector? *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 1(3), 34–48. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v1i3.4>
- Bowrey, G., Smark, C., & Jones, G. (2019). The Influence of Economic (Ir)rationality on Public Sector Reforms. *E-Journal of Social & Behavioural Research in Business*, 10(1), 24–39.
- Bowrey, G., Smark, C., & Watts, T. (2016). Financial Accountability: The Contribution of Senate Estimates. *Australian Journal of Public Administration*, 75(1), 28–38. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12116>
- Bracci, E., Humphrey, C., Moll, J., & Steccolini, I. (2015). Public sector accounting, accountability and austerity: More than balancing the books? *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 28(6), 878–908. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2015-2090>
- Brown, A. (2018). Accountability of the financial reporting of Kenya's regional development authorities. *Regional Studies*, 52(7), 997–1008. <https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1362500>
- Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(5), 486–504. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>
- Budiarto, D. S., & Damayanti, D. (2020). Pengujian Struktural pada Komitmen Manajemen, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 17. <https://doi.org/10.20961/jab.v20i1.508>
- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 34–48. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2595>
- Dalnial, H., Kamaluddin, A., Sanusi, Z. M., & Khairuddin, K. S. (2014). Accountability in Financial Reporting: Detecting Fraudulent Firms. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 61–69. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.011>
- Dewi, N. F., Ferdous Azam, S. M., & Yusoff, S. K. M. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1373–1384. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.013>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <http://www.jstor.org/stable/2095101> .
- Enwereji, P. C., & Uwizeyimana, D. (2019). Exploring the key factors that can

enhance municipal financial accountability in Africa: Experience from South Africa. *African Renaissance*, 16, 143–165. <https://doi.org/10.31920/2516-5305/2019/v16n2a8>

- Febri, D., Rahayu, S., & Wiralestari. (2019). Competence , and Control Systems Government Interns To the. *PENGARUH PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS DI KOTA JAMBI)*, 38–52.
- Fikrian, H., Hasan, A., & ' A. (2016). PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 265–279.
- Hasan, N. A. dan H. M. A. (2016). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 449–461.
- Haza, I. I. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawas Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ( Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang ). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 2–17.
- Igbokwe-Ibeto, C. J., Nkomah, B. B., Osakede, K. O., & Kinge, R. F. (2016). Treasury Single Account – Transparency and Accountability in Public Finance Management in Nigeria: The Journey So Far. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 4(2), 342. <https://doi.org/10.4102/apsdpr.v4i2.116>
- Indrayani, H., Wulandari, H., & Miftah, D. (2017). PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, DAN KOMITMEN TERHADAP TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PTKI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Al-Iqtishad*, 2.
- Iqmal, M., Kamaruddin, H., Ramli, N. M., Islam, U. S., & Sembilan, N. (2018). The Impacts of Internal Control Practices on Financial Accountability in Islamic Non-Profit Organizations in Malaysia. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(2), 365–391.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of ( 1 ) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.*

- Kajimbwa, M. G. A. (2018). Benchmarking accountability of local government authorities in public procurement in Tanzania: A methodological approach. *Benchmarking*, 25(6), 1829–1843. <https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2016-0120>
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani\_ Universitas Gunung Rinjani*, 7(2).
- Kawatu, F. S., & Kewo, C. L. (2019). The Factors Influencing Managerial Performance and Their Effect on Financial Accountability. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(5), 135–139. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8551>
- Keerasuntonpong, Prae. Dunstan, Keitha. Khanna, B. (2014). EXAMINING STATEMENTS OF SERVICE PERFORMANCE: EVIDENCE FROM WASTEWATER SERVICES IN NEW ZEALAND. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 614–642.
- Keerasuntonpong, P., Manowan, P., & Shutibhinyo, W. (2019). Reforming government public accountability: the case of Thailand. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 31(2), 237–263. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2018-0051>
- Keuangan, P. P. R. I. N. 58 T. 2005 T. P. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://doi.org/10.1109/ROBIO.2007.4522450>
- Kewo, C. L. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 293–297. <http://www.econjournals.com>
- Kluvers, Ron. Tippett, J. (2011). The Views of Councillors and Managers on Accountability in Local Government: An Empirical Study in Australia. *International Journal of Management*, 28(2), 519–527. <https://www.lib.uts.edu.au/goto?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=heh&AN=61188950&site=ehost-live>
- Kudo, H. (2008). *Does E Government Guarantee Accountability in Public Sector? EXPERIENCES IN ITALY AND JAPAN*.
- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). *KEUANGAN DAERAH ( Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018 ) THE EFFECT OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATMENT AND ACCESSIBILITY FINANCIAL STATMENT ON REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY ( Case Study in Mataram City Regional Secre*. 6(1), 705–714.

- Kuwawenaruwa, A., Kuwawenaruwa, A., Kuwawenaruwa, A., Tediosi, F., Tediosi, F., Obrist, B., Obrist, B., Metta, E., Metta, E., Chiluda, F., Wiedenmayer, K., Wiedenmayer, K., Wiedenmayer, K., Wyss, K., & Wyss, K. (2020). The role of accountability in the performance of Jazia prime vendor system in Tanzania. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s40545-020-00220-8>
- Lourenço, R. P., Sá, P. M. E., Jorge, S., & Pattaro, A. F. (2013). Online Transparency for Accountability: One Assessing Model and two Applications. *Electronic Journal of E-Government*, 11(2), 280–292. <http://search.proquest.com/docview/1520561409?accountid=12037%5Cnhttp://linksource.ebsco.com/linking.aspx?sid=ProQ:hightechjournals&fmt=journal&genre=article&issn=&volume=11&issue=2&date=2013-12-01&spage=280&title=Electronic+Journal+of+E-Government&atitle>
- Matuleviciene, M., & Stravinskiene, J. (2015). The importance of stakeholders for corporate reputation. *Engineering Economics*, 26(1), 75–83. <https://doi.org/10.5755/j01.ee.26.1.6921>
- Monfardini, P. (2010). Accountability in the new public sector: A comparative case study. *International Journal of Public Sector Management*, 23(7), 632–646. <https://doi.org/10.1108/09513551011078897>
- Muñoz, L. A., & Bolívar, A. P. R. (2015). Determining factors of transparency and accountability in local governments: A meta-analytic study. *Lex Localis*, 13(2), 129–160. [https://doi.org/10.4335/13.2.129-160\(2015\)](https://doi.org/10.4335/13.2.129-160(2015))
- Munzhedzi, P. H. (2016). Fostering public accountability in South Africa: A reflection on challenges and successes. *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 12(1), 1–8. <https://doi.org/10.4102/td.v12i1.339>
- Muraina, S. A., & Dandago, K. I. (2019). Effects of implementation of International Public Sector Accounting Standards on Nigeria's financial reporting quality. *International Journal of Public Sector Management*, 33(2–3), 323–338. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2018-0277>
- Mutiganda, J. C. (2013). Budgetary governance and accountability in public sector organisations: An institutional and critical realism approach. *Critical Perspectives on Accounting*, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.08.003>
- Mzenzi, S. I., & Gaspar, A. F. (2015). External auditing and accountability in the tanzanian local government authorities. *Managerial Auditing Journal*, 30(6–7), 681–702. <https://doi.org/10.1108/MAJ-04-2014-1028>
- Nurilah. (2014). PENGARUH KOMPTENSI SUMBER DAYA MANUSIA , PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI , ( Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok ). *JOM FEKON Universitas Diponegoro*, 3, 1–13.
- Nzewi, O., & Musokeru, P. (2014). A Critical Review of the Oversight Role of the

- Office of the Auditor-General in Financial Accountability. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 2(1), 36. <https://doi.org/10.4102/apsdpr.v2i1.42>
- Pahala, I., Sudarma, M., Sutrisno, S., & Rosidi, R. (2016). Financial Accountability on Public Service Agency (BLU): Phenomenological study at the State University of Jakarta. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(2), 11–27.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (n.d.). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. (n.d.). [http://www2.pom.go.id/public/hukum\\_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan%20rokok%20bagi%20kehatan.pdf)
- Perdana, A. (2011). *Isomorfisma Dalam Adopsi Teknologi Informasi Pada UMKM. 2011*(Snati), 17–18.
- PP Nomor 60 Tahun 2008*. (n.d.).
- Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 87. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.291>
- Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 102–108. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4884>
- Quayle, B., Sciulli, N., & Wilson-Evered, E. (2020). Accountable to who, to whom, for what and how? Unpacking accountability in local government response to climate change. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 14(3), 56–74. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v14i3.5>
- Rafindadi, A. A., & Olanrewaju, Z. A. (2019). The Impact of Internal Control System on the Financial Accountability of Non-Governmental Organisations in Nigeria: Evidence From the Structural Equation Modelling. *International Review of Management and Marketing*, 9(3), 49–63. <https://doi.org/10.32479/irmm.7909>
- Rahayu, L., ' K., & Anisma, Y. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(2), 1–15.
- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi

- Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota ). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 4–28. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2395>
- Ridha, A. M., & Basuki, H. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 87. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.291>
- Salamah, U. (2013). PENGARUH GOOD GOVERNANCE, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI PEMODERASI (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Samkin, G., & Schneider, A. (2010). Accountability, narrative reporting and legitimation: The case of a New Zealand public benefit entity. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 23(2), 256–289. <https://doi.org/10.1108/09513571011023219>
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 571–585.
- Sekaran, U. (2003). Research and Markets: Research Methods for Business - A Skill Building Approach. In *John Wiley & Sons*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/17506200710779521>
- Setyanto, Eko. Ritchi, H. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survey atas Kompetensi Aparatur, Kualitas Software SIA Penerapan SPI dan Penerapan SAP pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat) Eko. *Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 51–69.
- Shah, A. (2014). Responsibility with accountability: A fair governance framework for performance accountability of local governments. *Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet Au Rijeci*, 32(2), 343–347.
- Sintejeanu, M. A., & Farcas, T. V. (2017). *E-Governance in Public Sector : Online Transparency for Romanian Hospitals*. 7(1), 33–43.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*,

4(1), 2015–2029.

- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Teo, H. H., & Benbasat, I. (2003). Predicting Intention to Adopt Interorganizational Linkages: An Institutional Perspective. *MIS Quarterly*, 27(1), 19–49.
- Trisaptia, Y., (perdana.hlm@gmail.com), H. D. P., & Sulardi. (2016). Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 75–86.
- Tumwebaze, Z., Mukyala, V., Ssekiziyivu, B., Tirisa, C. B., & Tumwebonire, A. (2018). Corporate governance, internal audit function and accountability in statutory corporations. *Cogent Business and Management*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1527054>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. (2008).
- Verbeeten, F. H. M. (2008). Performance management practices in public sector organizations: Impact on performance. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 21(3), 427–454. <https://doi.org/10.1108/09513570810863996>
- Veronica, M., Juma, B., Maureen, B., Zainabu, T., & Lasuli, B. (2017). Accountability of local government authorities: A developing economy perspective. *African Journal of Business Management*, 11(12), 266–274. <https://doi.org/10.5897/ajbm2017.8326>
- Vluggen, R., Gelderman, C. J., Semeijn, J., & van Pelt, M. (2019). Sustainable public procurement-external forces and accountability. *Sustainability (Switzerland)*, 11(20), 9–17. <https://doi.org/10.3390/su11205696>
- Wirama, I. M. Y. W. G. P. (2019). Ni Ketut Rasmini 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Satuan*, Vol. 8(2), 899–911.
- Wisdom, O., & Oyebisi, O. . (2017). IMPACT OF PUBLIC SECTOR AUDITING IN PROMOTING ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN NIGERIA. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 22(3).
- Wulanda, R. D. P. (2017). Faculty of Economics Riau University ., *JOMFekom*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Yolanda, S. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian

Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating. *Jom Feb*, 1.

Zerban, A. M. (2015). Enhancing Accountability of E-Government in Saudi Arabia Public Sector Organizations through Balanced Score-Card. *International Research Journal of Applied Finance*, VI, 712–732.

Zucker, L. G. (1987). Institutional theories of organization. *Annual Review of Sociology*. Vol. 13, 443–464.  
<https://doi.org/10.1146/annurev.so.13.080187.002303>





## Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KOTA MANADO**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**  
 Jl. Balai Kota Nomor 1 Manado 95124  
 Telepon.(0431)863203 Faks (0431) 863203 website : www.manadokota.go.id

---

<p>Nomor : 800/B.04/BKPSDM/45 /2021          Sifat : Penting          Lampiran : -          Hal : Persetujuan Penelitian/Survey</p>	<p style="text-align: right;">Manado, 28 Januari 2021          Kepada :          Yth. Para Kepala Perangkat Daerah          di-          Tempat</p>
---	---

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Nomor : 34/DEK/10/Div.URT/1/2021 tanggal 05 Januari 2021 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka bersama ini Pemerintah Kota Manado memberikan izin kepada :

Nama	: Nadila Dwi Anggraeni
NIM	: 17312551
Jurusan/Prog. Studi	: Akuntansi / S1
Fakultas	: Bisnis dan Ekonomika

Untuk melakukan Penelitian/Survey di Lingkungan Pemerintah Kota Manado dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tekanan Koersif, Tekanan Mimetik dan Tekanan Normatif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi di Kota Manado".

Demikian disampaikan, dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. WALIKOTA MANADO  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA



MICLER C. S. LAKAT, SH, MH  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19650310 198611 1 002

Tembusan yth :

1. Walikota Manado (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Manado
3. Arsip

## Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Dengan Hormat.

Dalam rangka penelitian yang saya lakukan untuk penyusunan tugas akhir S1 pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tekanan Koersif, Tekanan Mimetik, dan Tekanan Normatif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi di Kota Manado”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dan mengisi kuesioner terlampir secara objektif. Semua informasi hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/Saudara/i akan terjaga.

Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

Mahasiswa,



Nadila Dwi Anggraeni

## DATA DIRI RESPONDEN

### Bagian I

Silakan isi atau memberi tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan data diri Bapak/Ibu/ Saudara/i responden.

Nama Instansi/SKPD : .....

Jabatan : .....

Jenis kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Umur (tahun) :  <20 tahun  20-35 tahun  36-50 tahun  
 >50 tahun

Pendidikan terakhir :  SMA  D3  S1  S2  S3  
 Lainnya

Lama bekerja :  1-5 tahun  6-10 tahun  >10 tahun

### Bagian II

Untuk menjawab kuesioner Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda centang (√) sesuai pada kolom pilihan jawaban yang tersedia dengan keterangan sebagai berikut:

Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 : Tidak Setuju (TS)

Skor 3 : Ragu-Ragu (RR)

Skor 4 : Setuju (S)

Skor 5 : Sangat Setuju (SS)

**ITEM PERTANYAAN:****1. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

No	Pertanyaan	(1) STS	(2) TS	(3) RR	(4) S	(5) SS
1	Laporan keuangan instansi tempat saya disajikan tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan					
2	Instansi tempat saya bekerja mampu menyusun laporan keuangan pemerintah secara lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan					
3	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan instansi di tempat saya telah disajikan dengan jujur dan teruji kebenarannya					
4	Laporan keuangan instansi di tempat saya disusun sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku					
5	Informasi laporan keuangan yang disusun oleh instansi di tempat saya menyediakan akses kepada pemangku kepentingan atas laporan keuangan					

**2. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

No	Pertanyaan	(1) STS	(2) TS	(3) RR	(4) S	(5) SS
1	Pengelolaan keuangan/akuntansi sejak awal transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi					
2	Bagian keuangan di instansi tempat saya bekerja telah menggunakan <i>software</i> aplikasi untuk pengelolaan data transaksi keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
3	Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) dan menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur					

4	Saya sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah memanfaatkan jaringan internet di instansi saya sebagai penghubung guna pengiriman informasi yang dibutuhkan					
5	Pada instansi tempat saya bekerja telah terpasang jaringan internet dalam keadaan yang baik/lancar untuk digunakan					

### 3. Tekanan Koersif

No	Pertanyaan	(1) STS	(2) TS	(3) RR	(4) S	(5) SS
1	Terbitnya undang-undang atau peraturan tentang akuntabilitas mengharuskan instansi tempat saya bekerja untuk menerapkan akuntabilitas laporan keuangan					
2	Seringnya pemberitaan media massa akan akuntabilitas laporan keuangan					
3	Semakin meningkatnya kritik dari masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan					
4	Pengusaha atau komunitas bisnis menuntut instansi tempat saya bekerja atas akuntabilitas laporan keuangan					

### 4. Tekanan Mimetik

No	Pertanyaan	(1) STS	(2) TS	(3) RR	(4) S	(5) SS
1	Saya selalu menjaga hubungan yang stabil dengan lingkungan dimana instansi tempat saya bekerja					
2	Implementasi akuntabilitas laporan keuangan di instansi saya lebih ditujukan untuk memperbaiki legitimasi SKPD untuk memperoleh dukungan dari masyarakat					
3	Implementasi akuntabilitas laporan keuangan di instansi saya lebih ditujukan untuk menyediakan					

	informasi keuangan yang memiliki dampak positif terhadap SKPD					
4	Instansi tempat saya bekerja menerapkan konsep akuntabilitas yang telah banyak diterapkan oleh SKPD lain					

### 5. Tekanan Normatif

No	Pertanyaan	(1) STS	(2) TS	(3) RR	(4) S	(5) SS
1	Perlunya membenahi kurangnya keterampilan staf untuk mendukung penerapan akuntabilitas laporan keuangan					
2	Pentingnya pendidikan yang berkelanjutan dalam internal instansi tempat saya bekerja untuk menghadapi perubahan lingkungan yang semakin kompleks					
3	Saya berusaha untuk membangun budaya etis organisasi dalam menerapkan akuntabilitas laporan keuangan di instansi tempat saya bekerja					
4	Akuntabilitas laporan keuangan membuat kepercayaan masyarakat terhadap SKPD menjadi meningkat					

### 6. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

No	Pertanyaan	(1) STS	(2) TS	(3) RR	(4) S	(5) SS
1	Penyusunan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah dibuat sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)					
2	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat mencegah kecurangan dan penyelewengan telah diimplementasikan pada instansi tempat saya bekerja					
3	Pada instansi tempat saya bekerja telah dilakukan pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi					

4	Pada instansi tempat saya bekerja telah membuat dan menggunakan dokumen/catatan yang memadai					
5	Pada instansi tempat saya bekerja telah diterapkan tindakan disiplin jika terjadi suatu penyimpangan terhadap kebijakan/prosedur atau pelanggaran terhadap aturan					



### Lampiran 3 : Tabulasi Data Hasil Kuesioner Responden

Variabel Y = Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							Rata-rata
Responden	ALK_1	ALK_2	ALK_3	ALK_4	ALK_5	Total	
1	5	5	5	5	5	25	5.00
2	5	5	5	5	5	25	5.00
3	4	4	4	4	4	20	4.00
4	4	4	4	4	4	20	4.00
5	5	5	5	5	4	24	4.80
6	5	5	4	5	4	23	4.60
7	4	4	4	4	4	20	4.00
8	4	4	3	4	4	19	3.80
9	4	4	4	4	4	20	4.00
10	5	5	5	5	5	25	5.00
11	4	4	4	4	4	20	4.00
12	4	4	4	4	4	20	4.00
13	4	4	4	3	4	19	3.80
14	5	5	5	5	5	25	5.00
15	5	4	5	5	5	24	4.80
16	4	5	4	5	4	22	4.40
17	5	5	5	5	4	24	4.80
18	4	4	4	4	4	20	4.00
19	4	5	4	5	4	22	4.40
20	4	5	4	5	4	22	4.40
21	4	5	4	5	4	22	4.40
22	4	5	4	5	4	22	4.40
23	4	5	4	5	4	22	4.40
24	4	5	4	5	4	22	4.40
25	4	5	4	5	4	22	4.40
26	4	4	4	4	4	20	4.00
27	5	5	5	5	5	25	5.00
28	4	4	4	4	4	20	4.00
29	4	4	4	4	4	20	4.00
30	4	5	4	4	4	21	4.20
31	4	4	4	4	4	20	4.00
32	4	4	4	4	4	20	4.00
33	5	5	4	4	4	22	4.40
34	4	4	4	4	4	20	4.00
35	4	5	4	5	4	22	4.40

36	4	5	4	5	4	22	4.40
37	5	5	5	5	5	25	5.00
38	5	5	5	5	5	25	5.00
39	5	5	5	5	5	25	5.00
40	4	5	5	5	4	23	4.60
41	4	5	5	5	5	24	4.80
42	4	4	4	5	4	21	4.20
43	4	5	5	5	5	24	4.80
44	4	4	4	4	4	20	4.00
45	4	4	4	4	4	20	4.00
46	4	4	5	5	4	22	4.40
47	5	4	4	4	5	22	4.40
48	4	4	5	5	4	22	4.40
49	3	4	2	4	4	17	3.40
50	4	4	4	4	4	20	4.00
51	4	5	4	4	2	19	3.80
52	4	4	4	4	4	20	4.00
53	4	4	4	4	4	20	4.00
54	4	4	4	4	4	20	4.00
55	4	4	4	4	4	20	4.00
56	4	4	4	4	4	20	4.00
57	4	4	5	5	4	22	4.40
58	4	4	5	4	4	21	4.20
59	5	5	5	5	5	25	5.00
60	4	5	5	5	5	24	4.80
61	5	5	5	5	5	25	5.00
62	4	4	4	4	4	20	4.00
63	5	5	5	5	5	25	5.00
64	4	4	4	4	4	20	4.00
65	4	5	4	4	2	19	3.80
66	4	4	4	4	4	20	4.00
67	5	5	5	5	5	25	5.00
68	5	5	5	5	5	25	5.00
69	5	5	5	5	5	25	5.00
70	4	5	4	5	4	22	4.40
71	4	5	5	5	4	23	4.60
72	4	4	4	4	4	20	4.00
73	4	4	4	4	4	20	4.00
74	4	4	4	4	4	20	4.00

75	4	4	4	4	4	20	4.00
76	4	5	4	4	4	21	4.20
77	4	4	4	4	4	20	4.00
78	4	4	4	4	4	20	4.00
79	4	4	4	4	4	20	4.00
80	4	4	4	4	4	20	4.00
81	4	4	4	4	4	20	4.00
82	5	5	5	5	5	25	5.00
83	4	4	4	5	4	21	4.20
84	5	5	5	5	4	24	4.80
85	4	4	4	5	5	22	4.40
86	4	4	5	5	4	22	4.40
87	4	4	4	4	4	20	4.00
88	4	4	4	4	4	20	4.00
89	5	5	5	5	5	25	5.00
90	5	4	5	5	4	23	4.60
91	5	5	5	5	5	25	5.00
92	4	4	4	4	4	20	4.00
93	4	4	4	4	4	20	4.00
94	4	4	4	4	4	20	4.00
95	4	4	4	4	4	20	4.00
96	4	4	4	4	4	20	4.00
97	4	4	5	4	4	21	4.20
98	4	4	4	4	4	20	4.00
99	5	5	5	5	5	25	5.00
100	4	4	4	4	4	20	4.00
101	4	4	4	5	4	21	4.20
102	5	5	5	5	5	25	5.00
103	4	4	4	4	4	20	4.00
104	4	4	4	5	4	21	4.20
105	4	4	4	4	4	20	4.00
106	4	4	4	4	4	20	4.00
107	4	4	4	4	4	20	4.00
108	4	4	4	4	4	20	4.00
109	5	5	5	5	5	25	5.00
110	5	5	5	5	5	25	5.00
111	4	4	4	4	4	20	4.00
112	4	4	4	4	4	20	4.00
113	5	5	5	5	4	24	4.80

114	5	5	4	5	4	23	4.60
115	4	4	4	4	4	20	4.00
116	5	5	5	5	5	25	5.00
117	5	5	5	5	5	25	5.00
118	5	5	5	5	5	25	5.00
119	4	5	4	5	4	22	4.40
120	4	5	5	5	4	23	4.60
121	4	4	4	4	4	20	4.00
122	4	4	4	4	4	20	4.00
123	4	4	4	4	4	20	4.00
124	4	4	4	4	4	20	4.00

Variabel X1 = Pemanfaatan Teknologi Informasi							Rata-rata
Responden	PTI_1	PTI_2	PTI_3	PTI_4	PTI_5	Total	
1	4	5	4	4	5	22	4.40
2	5	5	4	5	5	24	4.80
3	4	4	4	3	3	18	3.60
4	4	4	4	4	4	20	4.00
5	4	5	5	5	5	24	4.80
6	5	5	4	5	4	23	4.60
7	4	4	4	4	4	20	4.00
8	4	4	4	3	4	19	3.80
9	4	4	4	4	4	20	4.00
10	5	5	5	5	4	24	4.80
11	4	4	4	4	4	20	4.00
12	4	4	4	4	4	20	4.00
13	4	4	3	4	4	19	3.80
14	4	5	5	5	5	24	4.80
15	5	5	5	5	5	25	5.00
16	4	4	3	5	4	20	4.00
17	4	4	4	3	3	18	3.60
18	4	4	4	4	4	20	4.00
19	4	4	3	5	4	20	4.00
20	4	4	3	5	4	20	4.00
21	4	4	5	5	4	22	4.40
22	4	4	3	5	5	21	4.20
23	4	4	3	5	4	20	4.00
24	4	4	3	5	4	20	4.00

25	4	4	3	5	4	20	4.00
26	4	4	4	4	4	20	4.00
27	5	5	4	5	5	24	4.80
28	4	4	4	4	4	20	4.00
29	4	4	4	5	5	22	4.40
30	5	5	4	5	5	24	4.80
31	5	5	4	4	5	23	4.60
32	4	4	4	4	4	20	4.00
33	5	4	4	5	5	23	4.60
34	4	5	5	4	4	22	4.40
35	4	4	3	5	4	20	4.00
36	4	4	3	5	4	20	4.00
37	5	5	5	5	5	25	5.00
38	5	5	5	5	5	25	5.00
39	5	5	5	5	5	25	5.00
40	4	5	4	5	5	23	4.60
41	5	5	4	5	5	24	4.80
42	4	4	4	4	4	20	4.00
43	5	5	5	5	4	24	4.80
44	4	4	3	4	5	20	4.00
45	4	4	3	4	5	20	4.00
46	4	5	5	4	5	23	4.60
47	5	5	3	4	2	19	3.80
48	4	4	4	5	5	22	4.40
49	4	4	3	4	3	18	3.60
50	4	4	4	4	4	20	4.00
51	4	4	4	4	4	20	4.00
52	4	4	4	4	4	20	4.00
53	4	4	4	4	4	20	4.00
54	4	4	4	4	4	20	4.00
55	4	4	3	4	4	19	3.80
56	3	3	4	4	4	18	3.60
57	4	4	4	4	4	20	4.00
58	5	4	4	5	4	22	4.40
59	5	5	4	5	4	23	4.60
60	5	4	3	5	4	21	4.20
61	5	5	5	5	5	25	5.00
62	4	4	4	4	4	20	4.00
63	5	5	3	5	5	23	4.60

64	4	3	4	4	3	18	3.60
65	4	4	4	4	4	20	4.00
66	4	4	4	4	4	20	4.00
67	5	5	4	5	5	24	4.80
68	4	4	4	4	4	20	4.00
69	4	4	4	4	4	20	4.00
70	4	5	4	5	5	23	4.60
71	4	5	4	5	5	23	4.60
72	5	5	4	4	4	22	4.40
73	5	5	4	4	4	22	4.40
74	4	4	4	4	4	20	4.00
75	4	4	4	4	4	20	4.00
76	4	4	4	4	4	20	4.00
77	5	4	4	3	3	19	3.80
78	4	4	4	4	4	20	4.00
79	4	4	5	4	4	21	4.20
80	4	4	4	4	4	20	4.00
81	4	4	4	4	4	20	4.00
82	5	4	4	4	4	21	4.20
83	5	5	3	5	4	22	4.40
84	5	5	5	5	5	25	5.00
85	4	4	3	4	5	20	4.00
86	5	5	3	5	5	23	4.60
87	4	4	3	4	3	18	3.60
88	4	4	4	4	4	20	4.00
89	5	5	5	5	5	25	5.00
90	4	4	4	4	4	20	4.00
91	4	4	4	4	4	20	4.00
92	5	5	5	5	5	25	5.00
93	4	4	4	4	4	20	4.00
94	4	4	4	5	5	22	4.40
95	4	4	4	4	4	20	4.00
96	4	4	4	4	4	20	4.00
97	4	4	5	4	4	21	4.20
98	4	4	4	4	4	20	4.00
99	5	5	5	5	5	25	5.00
100	4	4	4	4	4	20	4.00
101	4	4	4	4	4	20	4.00
102	5	5	5	5	5	25	5.00

103	4	5	4	5	4	22	4.40
104	4	4	4	4	4	20	4.00
105	4	4	3	4	4	19	3.80
106	4	4	4	4	4	20	4.00
107	4	4	4	4	4	20	4.00
108	4	4	4	4	4	20	4.00
109	4	4	4	4	4	20	4.00
110	4	5	4	5	5	23	4.60
111	4	5	4	5	5	23	4.60
112	5	5	4	4	4	22	4.40
113	5	5	4	4	4	22	4.40
114	4	4	4	4	4	20	4.00
115	4	4	4	4	4	20	4.00
116	4	4	4	4	4	20	4.00
117	5	4	4	3	3	19	3.80
118	4	4	4	4	4	20	4.00
119	4	4	5	4	4	21	4.20
120	4	4	4	4	4	20	4.00
121	4	5	4	5	5	23	4.60
122	5	5	4	5	5	24	4.80
123	4	4	4	4	4	20	4.00
124	5	5	3	5	5	23	4.60

Variabel X2 = Tekanan Koersif						Rata-rata
Responden	TK_1	TK_2	TK_3	TK_4	Total	
1	5	5	4	4	18	4.50
2	5	5	4	4	18	4.50
3	3	3	3	3	12	3.00
4	4	3	4	4	15	3.75
5	5	4	4	4	17	4.25
6	5	4	5	4	18	4.50
7	3	3	3	3	12	3.00
8	4	4	4	4	16	4.00
9	4	4	3	3	14	3.50
10	5	5	5	4	19	4.75
11	4	3	4	4	15	3.75
12	4	3	4	4	15	3.75
13	4	3	4	3	14	3.50

14	5	5	5	5	20	5.00
15	4	2	4	5	15	3.75
16	4	3	4	4	15	3.75
17	4	4	4	4	16	4.00
18	4	2	4	2	12	3.00
19	4	3	4	4	15	3.75
20	4	3	4	4	15	3.75
21	4	3	4	4	15	3.75
22	4	3	4	4	15	3.75
23	4	3	4	4	15	3.75
24	4	2	4	4	14	3.50
25	4	3	4	4	15	3.75
26	4	4	4	4	16	4.00
27	4	4	4	4	16	4.00
28	4	4	4	4	16	4.00
29	4	4	4	4	16	4.00
30	4	4	4	4	16	4.00
31	4	5	5	4	18	4.50
32	3	4	4	3	14	3.50
33	4	4	5	4	17	4.25
34	4	4	4	4	16	4.00
35	4	3	4	4	15	3.75
36	4	3	4	4	15	3.75
37	5	5	4	4	18	4.50
38	5	5	5	5	20	5.00
39	5	5	5	4	19	4.75
40	5	5	4	4	18	4.50
41	5	5	5	4	19	4.75
42	4	4	4	4	16	4.00
43	4	4	5	4	17	4.25
44	4	4	4	4	16	4.00
45	4	4	3	3	14	3.50
46	4	5	4	4	17	4.25
47	4	5	3	5	17	4.25
48	4	4	4	4	16	4.00
49	4	2	4	2	12	3.00
50	4	4	2	2	12	3.00
51	4	4	4	2	14	3.50
52	5	4	5	5	19	4.75

53	4	4	4	4	16	4.00
54	4	4	4	4	16	4.00
55	4	3	3	3	13	3.25
56	4	4	4	3	15	3.75
57	4	4	4	2	14	3.50
58	4	4	4	4	16	4.00
59	5	4	4	4	17	4.25
60	5	5	4	4	18	4.50
61	5	5	4	3	17	4.25
62	4	3	4	3	14	3.50
63	5	3	3	3	14	3.50
64	4	3	3	3	13	3.25
65	4	4	4	2	14	3.50
66	4	4	4	4	16	4.00
67	4	4	4	4	16	4.00
68	4	3	4	3	14	3.50
69	4	4	4	4	16	4.00
70	5	4	3	4	16	4.00
71	5	3	3	3	14	3.50
72	4	4	4	4	16	4.00
73	4	4	5	4	17	4.25
74	4	4	4	4	16	4.00
75	4	4	4	4	16	4.00
76	5	4	4	4	17	4.25
77	4	4	5	4	17	4.25
78	4	4	4	4	16	4.00
79	4	4	5	4	17	4.25
80	4	4	4	4	16	4.00
81	4	4	4	4	16	4.00
82	5	5	5	5	20	5.00
83	5	4	4	4	17	4.25
84	5	4	5	4	18	4.50
85	4	4	4	4	16	4.00
86	4	3	4	2	13	3.25
87	4	3	3	3	13	3.25
88	4	5	5	4	18	4.50
89	5	4	5	5	19	4.75
90	4	4	3	4	15	3.75
91	4	4	4	4	16	4.00

92	4	4	4	4	16	4.00
93	4	4	4	4	16	4.00
94	5	3	4	4	16	4.00
95	4	4	3	4	15	3.75
96	4	4	4	3	15	3.75
97	4	5	4	4	17	4.25
98	4	4	4	4	16	4.00
99	5	4	4	4	17	4.25
100	4	3	4	4	15	3.75
101	4	3	4	4	15	3.75
102	5	4	4	4	17	4.25
103	4	4	4	4	16	4.00
104	4	3	4	4	15	3.75
105	4	4	4	4	16	4.00
106	4	4	4	4	16	4.00
107	4	4	4	4	16	4.00
108	4	4	4	4	16	4.00
109	5	4	5	4	18	4.50
110	4	4	4	4	16	4.00
111	4	3	4	2	13	3.25
112	4	3	3	3	13	3.25
113	4	5	5	4	18	4.50
114	5	4	5	5	19	4.75
115	4	4	3	4	15	3.75
116	4	4	4	4	16	4.00
117	4	4	4	4	16	4.00
118	4	4	4	4	16	4.00
119	5	3	4	4	16	4.00
120	4	4	3	4	15	3.75
121	4	4	4	4	16	4.00
122	5	4	5	4	18	4.50
123	4	4	4	4	16	4.00
124	4	3	4	4	15	3.75

Variabel X3 = Tekanan Mimetik						Rata-rata
Responden	TM_1	TM_2	TM_3	TM_4	Total	
1	4	5	5	5	19	4.75
2	5	5	5	5	20	5.00
3	4	3	4	4	15	3.75
4	4	4	4	4	16	4.00
5	4	4	4	4	16	4.00
6	5	5	5	4	19	4.75
7	4	3	4	4	15	3.75
8	5	3	3	3	14	3.50
9	4	4	4	4	16	4.00
10	5	4	4	4	17	4.25
11	5	4	4	4	17	4.25
12	5	4	4	4	17	4.25
13	4	4	3	3	14	3.50
14	5	5	5	5	20	5.00
15	5	4	3	2	14	3.50
16	5	3	4	4	16	4.00
17	5	3	4	3	15	3.75
18	4	4	4	4	16	4.00
19	5	3	4	4	16	4.00
20	5	4	4	4	17	4.25
21	5	3	4	4	16	4.00
22	5	3	4	4	16	4.00
23	5	3	4	4	16	4.00
24	5	3	4	4	16	4.00
25	5	4	4	4	17	4.25
26	5	4	4	4	17	4.25
27	4	3	4	4	15	3.75
28	4	4	4	4	16	4.00
29	4	4	4	4	16	4.00
30	5	4	4	4	17	4.25
31	5	4	4	4	17	4.25
32	4	4	4	4	16	4.00
33	4	4	4	4	16	4.00
34	5	4	4	4	17	4.25
35	5	3	4	4	16	4.00
36	5	3	4	4	16	4.00
37	5	5	5	4	19	4.75

38	5	5	5	5	20	5.00
39	5	5	5	5	20	5.00
40	4	5	5	5	19	4.75
41	5	4	5	5	19	4.75
42	4	4	4	4	16	4.00
43	5	4	4	4	17	4.25
44	4	4	4	4	16	4.00
45	4	4	4	4	16	4.00
46	4	5	4	4	17	4.25
47	5	4	4	4	17	4.25
48	5	4	4	4	17	4.25
49	4	4	4	4	16	4.00
50	4	3	4	4	15	3.75
51	4	3	4	4	15	3.75
52	5	5	5	5	20	5.00
53	4	4	4	4	16	4.00
54	4	4	4	4	16	4.00
55	4	4	3	4	15	3.75
56	3	3	4	4	14	3.50
57	5	4	4	4	17	4.25
58	4	4	4	4	16	4.00
59	5	3	5	4	17	4.25
60	5	2	5	5	17	4.25
61	5	4	4	5	18	4.50
62	4	4	4	4	16	4.00
63	5	5	5	5	20	5.00
64	4	4	4	4	16	4.00
65	4	3	4	4	15	3.75
66	4	4	4	4	16	4.00
67	4	4	4	3	15	3.75
68	4	5	5	4	18	4.50
69	5	4	4	4	17	4.25
70	4	4	4	5	17	4.25
71	5	5	5	5	20	5.00
72	4	4	5	4	17	4.25
73	5	5	4	4	18	4.50
74	4	4	4	4	16	4.00
75	4	4	4	4	16	4.00
76	5	4	5	4	18	4.50

77	4	4	4	4	16	4.00
78	5	5	4	4	18	4.50
79	5	4	4	4	17	4.25
80	4	4	4	4	16	4.00
81	4	4	4	4	16	4.00
82	5	4	4	5	18	4.50
83	4	4	4	4	16	4.00
84	5	4	5	5	19	4.75
85	5	4	4	5	18	4.50
86	5	4	4	4	17	4.25
87	4	3	4	4	15	3.75
88	4	5	4	4	17	4.25
89	5	5	5	5	20	5.00
90	5	4	4	5	18	4.50
91	5	4	4	4	17	4.25
92	5	4	4	4	17	4.25
93	4	4	4	4	16	4.00
94	5	4	4	4	17	4.25
95	4	4	4	4	16	4.00
96	4	4	4	4	16	4.00
97	4	4	4	4	16	4.00
98	4	4	4	4	16	4.00
99	4	4	4	4	16	4.00
100	4	4	4	4	16	4.00
101	4	4	4	4	16	4.00
102	4	4	4	4	16	4.00
103	4	4	4	4	16	4.00
104	4	4	4	4	16	4.00
105	4	4	4	4	16	4.00
106	4	4	4	4	16	4.00
107	4	4	4	4	16	4.00
108	4	4	4	4	16	4.00
109	4	4	4	4	16	4.00
110	4	4	4	4	16	4.00
111	5	4	4	5	18	4.50
112	4	4	4	4	16	4.00
113	5	4	5	5	19	4.75
114	5	4	4	5	18	4.50
115	5	4	4	4	17	4.25

116	4	3	4	4	15	3.75
117	4	5	4	4	17	4.25
118	4	3	4	4	15	3.75
119	4	4	4	4	16	4.00
120	4	4	4	3	15	3.75
121	4	5	5	4	18	4.50
122	4	5	4	4	17	4.25
123	5	4	4	4	17	4.25
124	5	4	4	4	17	4.25

Responden	Variabel X4 = Tekanan Normatif					Rata-rata
	TN_1	TN_2	TN_3	TN_4	Total	
1	5	5	4	4	18	4.50
2	5	5	5	5	20	5.00
3	4	4	4	4	16	4.00
4	4	5	5	5	19	4.75
5	5	5	5	5	20	5.00
6	5	4	4	5	18	4.50
7	4	4	4	4	16	4.00
8	4	4	4	4	16	4.00
9	4	5	4	3	16	4.00
10	4	4	4	4	16	4.00
11	4	4	5	5	18	4.50
12	4	4	5	5	18	4.50
13	4	3	5	4	16	4.00
14	5	5	5	5	20	5.00
15	5	5	3	5	18	4.50
16	4	4	4	5	17	4.25
17	5	5	5	4	19	4.75
18	4	4	4	4	16	4.00
19	4	4	4	5	17	4.25
20	4	4	4	4	16	4.00
21	4	4	4	5	17	4.25
22	4	4	4	5	17	4.25
23	4	4	4	5	17	4.25
24	4	4	4	5	17	4.25
25	4	4	4	4	16	4.00

26	4	4	4	4	16	4.00
27	4	4	4	5	17	4.25
28	5	5	4	4	18	4.50
29	4	4	4	4	16	4.00
30	4	5	4	5	18	4.50
31	4	5	4	4	17	4.25
32	4	5	5	5	19	4.75
33	4	4	5	4	17	4.25
34	4	4	4	4	16	4.00
35	4	4	4	5	17	4.25
36	4	4	4	5	17	4.25
37	5	5	5	5	20	5.00
38	5	5	5	5	20	5.00
39	5	5	5	5	20	5.00
40	5	5	4	4	18	4.50
41	5	4	5	5	19	4.75
42	4	4	4	4	16	4.00
43	5	5	4	5	19	4.75
44	3	4	3	4	14	3.50
45	3	4	3	4	14	3.50
46	4	5	4	4	17	4.25
47	2	4	5	5	16	4.00
48	3	4	4	4	15	3.75
49	4	4	4	4	16	4.00
50	2	4	4	4	14	3.50
51	4	5	4	5	18	4.50
52	5	5	5	5	20	5.00
53	4	4	4	4	16	4.00
54	4	4	5	5	18	4.50
55	3	4	4	3	14	3.50
56	4	4	4	4	16	4.00
57	4	4	4	4	16	4.00
58	4	5	4	4	17	4.25
59	5	5	4	5	19	4.75
60	5	5	4	3	17	4.25
61	2	4	5	5	16	4.00
62	4	4	4	4	16	4.00
63	4	5	5	5	19	4.75

64	3	4	4	4	15	3.75
65	4	5	4	5	18	4.50
66	4	4	4	4	16	4.00
67	3	4	3	4	14	3.50
68	5	5	4	4	18	4.50
69	4	4	4	4	16	4.00
70	5	5	4	5	19	4.75
71	5	5	5	5	20	5.00
72	5	5	4	5	19	4.75
73	4	4	4	4	16	4.00
74	4	4	4	4	16	4.00
75	4	4	4	4	16	4.00
76	5	5	5	5	20	5.00
77	5	5	4	5	19	4.75
78	4	4	4	4	16	4.00
79	4	5	4	5	18	4.50
80	4	4	4	4	16	4.00
81	4	4	4	4	16	4.00
82	5	5	5	5	20	5.00
83	5	5	5	4	19	4.75
84	5	5	5	4	19	4.75
85	4	5	5	5	19	4.75
86	4	5	4	4	17	4.25
87	4	4	4	4	16	4.00
88	4	5	4	5	18	4.50
89	5	4	5	5	19	4.75
90	5	5	5	5	20	5.00
91	4	4	4	4	16	4.00
92	4	4	4	4	16	4.00
93	4	4	4	4	16	4.00
94	4	4	4	4	16	4.00
95	4	4	4	4	16	4.00
96	4	4	4	4	16	4.00
97	4	4	4	4	16	4.00
98	4	4	4	4	16	4.00
99	5	4	4	4	17	4.25
100	5	5	4	4	18	4.50
101	4	5	4	4	17	4.25

102	5	4	4	4	17	4.25
103	4	5	4	5	18	4.50
104	5	5	4	4	18	4.50
105	4	4	4	4	16	4.00
106	4	5	4	4	17	4.25
107	4	5	5	5	19	4.75
108	4	5	4	4	17	4.25
109	4	4	4	4	16	4.00
110	4	5	4	5	18	4.50
111	4	4	4	4	16	4.00
112	4	4	4	4	16	4.00
113	5	5	5	5	20	5.00
114	5	5	5	4	19	4.75
115	5	5	5	4	19	4.75
116	4	5	5	5	19	4.75
117	4	5	4	4	17	4.25
118	4	4	4	4	16	4.00
119	4	5	4	5	18	4.50
120	5	4	5	5	19	4.75
121	4	4	5	5	18	4.50
122	3	4	4	3	14	3.50
123	4	4	4	4	16	4.00
124	4	4	4	4	16	4.00

Variabel X4 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah							Rata-rata
Responden	SPIP_1	SPIP_2	SPIP_3	SPIP_4	SPIP_5	Total	
1	5	5	5	5	5	25	5.00
2	5	5	5	5	5	25	5.00
3	4	4	4	4	4	20	4.00
4	4	4	4	4	4	20	4.00
5	5	5	5	5	5	25	5.00
6	4	5	4	4	4	21	4.20
7	4	4	4	4	4	20	4.00
8	4	4	4	3	4	19	3.80
9	4	4	3	4	5	20	4.00
10	4	4	4	4	4	20	4.00
11	5	4	4	4	4	21	4.20

12	5	4	4	4	4	21	4.20
13	4	3	4	3	4	18	3.60
14	5	5	5	5	5	25	5.00
15	5	5	3	5	5	23	4.60
16	4	4	4	4	4	20	4.00
17	4	4	3	4	4	19	3.80
18	4	4	4	4	4	20	4.00
19	4	4	4	4	4	20	4.00
20	4	4	4	4	4	20	4.00
21	4	4	4	4	4	20	4.00
22	4	4	4	4	4	20	4.00
23	4	4	4	4	4	20	4.00
24	4	4	4	4	4	20	4.00
25	4	4	4	4	4	20	4.00
26	4	4	4	4	4	20	4.00
27	5	4	5	5	5	24	4.80
28	4	5	4	4	4	21	4.20
29	5	5	4	4	4	22	4.40
30	5	4	4	4	4	21	4.20
31	5	4	5	4	4	22	4.40
32	5	4	4	4	4	21	4.20
33	5	5	4	4	4	22	4.40
34	4	4	4	4	4	20	4.00
35	4	4	4	4	4	20	4.00
36	4	4	4	4	4	20	4.00
37	5	5	5	5	5	25	5.00
38	5	4	5	5	5	24	4.80
39	5	5	5	5	5	25	5.00
40	5	5	4	4	5	23	4.60
41	5	5	5	5	5	25	5.00
42	4	4	4	4	4	20	4.00
43	5	4	4	4	4	21	4.20
44	4	4	4	4	4	20	4.00
45	4	4	4	4	4	20	4.00
46	5	4	4	5	4	22	4.40
47	5	5	4	5	4	23	4.60
48	4	4	4	4	4	20	4.00
49	3	4	4	3	4	18	3.60
50	4	4	4	4	4	20	4.00

51	4	4	4	4	4	20	4.00
52	5	5	5	5	5	25	5.00
53	4	4	4	4	4	20	4.00
54	4	4	4	4	4	20	4.00
55	4	4	3	4	4	19	3.80
56	4	4	4	4	4	20	4.00
57	4	4	4	4	4	20	4.00
58	4	4	4	4	4	20	4.00
59	5	5	5	4	4	23	4.60
60	5	5	5	4	5	24	4.80
61	5	5	5	5	5	25	5.00
62	4	4	4	4	4	20	4.00
63	5	5	5	5	5	25	5.00
64	4	4	4	4	4	20	4.00
65	4	4	4	4	4	20	4.00
66	4	4	4	4	4	20	4.00
67	5	4	4	5	4	22	4.40
68	5	5	4	4	4	22	4.40
69	5	4	4	4	4	21	4.20
70	5	5	4	4	4	22	4.40
71	5	5	4	4	4	22	4.40
72	5	4	4	4	4	21	4.20
73	4	4	4	4	4	20	4.00
74	4	4	4	4	4	20	4.00
75	4	4	4	4	4	20	4.00
76	4	3	4	4	4	19	3.80
77	4	4	4	4	4	20	4.00
78	5	5	4	4	4	22	4.40
79	5	4	3	4	4	20	4.00
80	5	4	4	4	4	21	4.20
81	4	4	4	4	4	20	4.00
82	5	5	5	5	5	25	5.00
83	5	4	4	4	4	21	4.20
84	5	5	5	5	5	25	5.00
85	5	4	4	4	4	21	4.20
86	5	4	4	5	5	23	4.60
87	4	4	3	4	4	19	3.80
88	4	4	4	4	4	20	4.00
89	4	5	4	5	5	23	4.60

90	5	5	5	5	5	25	5.00
91	5	4	4	4	5	22	4.40
92	4	4	4	4	4	20	4.00
93	4	4	4	4	4	20	4.00
94	4	4	4	4	4	20	4.00
95	5	4	4	4	4	21	4.20
96	5	4	4	4	4	21	4.20
97	5	4	4	4	4	21	4.20
98	4	4	4	4	4	20	4.00
99	5	5	4	4	5	23	4.60
100	4	4	4	4	4	20	4.00
101	4	4	4	4	4	20	4.00
102	5	5	4	4	5	23	4.60
103	4	4	4	4	4	20	4.00
104	4	4	4	4	4	20	4.00
105	4	4	4	4	4	20	4.00
106	5	4	4	4	5	22	4.40
107	4	4	4	4	4	20	4.00
108	5	4	4	4	4	21	4.20
109	4	4	4	4	4	20	4.00
110	4	4	4	4	4	20	4.00
111	5	4	4	5	4	22	4.40
112	5	5	4	4	4	22	4.40
113	5	4	4	4	4	21	4.20
114	5	5	4	4	4	22	4.40
115	5	5	4	4	4	22	4.40
116	5	4	4	4	4	21	4.20
117	4	4	4	4	4	20	4.00
118	4	4	4	4	4	20	4.00
119	4	4	4	4	4	20	4.00
120	4	3	4	4	4	19	3.80
121	4	4	4	4	4	20	4.00
122	5	4	4	4	4	21	4.20
123	4	4	4	4	4	20	4.00
124	4	4	4	4	4	20	4.00

### Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

#### Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

		Correlations					
		ALK_1	ALK_2	ALK_3	ALK_4	ALK_5	Skor_total
ALK_1	Pearson Correlation	1	.599**	.716**	.564**	.653**	.854**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	124	124	124	124	124	124
ALK_2	Pearson Correlation	.599**	1	.534**	.735**	.378**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	124	124	124	124	124	124
ALK_3	Pearson Correlation	.716**	.534**	1	.644**	.590**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	124	124	124	124	124	124
ALK_4	Pearson Correlation	.564**	.735**	.644**	1	.515**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	124	124	124	124	124	124
ALK_5	Pearson Correlation	.653**	.378**	.590**	.515**	1	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	124	124	124	124	124	124
Skor_total	Pearson Correlation	.854**	.788**	.852**	.845**	.765**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	124	124	124	124	124	124

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	124	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	124	100.0

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.878	5

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ALK_1	17.42	2.863	.772	.839
ALK_2	17.26	2.908	.665	.862
ALK_3	17.37	2.691	.751	.842
ALK_4	17.22	2.741	.744	.844
ALK_5	17.48	2.918	.626	.872

## Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)

## Correlations

		PTI_1	PTI_2	PTI_3	PTI_4	PTI_5	Skor_total
PTI_1	Pearson Correlation	1	.679**	.201*	.390**	.260**	.675**
	Sig. (2-tailed)		.000	.025	.000	.003	.000
	N	124	124	124	124	124	124
PTI_2	Pearson Correlation	.679**	1	.328**	.544**	.542**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	124	124	124	124	124	124
PTI_3	Pearson Correlation	.201*	.328**	1	.051	.251**	.533**
	Sig. (2-tailed)	.025	.000		.575	.005	.000
	N	124	124	124	124	124	124
PTI_4	Pearson Correlation	.390**	.544**	.051	1	.639**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.575		.000	.000
	N	124	124	124	124	124	124
PTI_5	Pearson Correlation	.260**	.542**	.251**	.639**	1	.772**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.005	.000		.000
	N	124	124	124	124	124	124
Skor_total	Pearson Correlation	.675**	.851**	.533**	.738**	.772**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	124	124	124	124	124	124

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	124	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	124	100.0

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	5

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PTI_1	16.89	2.703	.505	.713
PTI_2	16.85	2.310	.746	.626
PTI_3	17.19	2.840	.258	.804
PTI_4	16.81	2.429	.552	.693
PTI_5	16.94	2.305	.593	.677

**Variabel Tekanan Koersif (X2)****Correlations**

		TK_1	TK_2	TK_3	TK_4	Skor_total
TK_1	Pearson Correlation	1	.357**	.341**	.305**	.646**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000
	N	124	124	124	124	124
TK_2	Pearson Correlation	.357**	1	.329**	.350**	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	124	124	124	124	124
TK_3	Pearson Correlation	.341**	.329**	1	.425**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	124	124	124	124	124
TK_4	Pearson Correlation	.305**	.350**	.425**	1	.743**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000
	N	124	124	124	124	124
Skor_total	Pearson Correlation	.646**	.747**	.720**	.743**	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N	124	124	124	124	124

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	124	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	124	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.676	4

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TK_1	11.65	2.163	.440	.630
TK_2	12.04	1.665	.453	.621
TK_3	11.85	1.887	.487	.592
TK_4	12.07	1.743	.481	.594

### Variabel Tekanan Mimetik (X3)

		TM_1	TM_2	TM_3	TM_4	Skor_total
TM_1	Pearson Correlation	1	.035	.232**	.252**	.546**
	Sig. (2-tailed)		.697	.009	.005	.000
	N	124	124	124	124	124
TM_2	Pearson Correlation	.035	1	.389**	.289**	.669**
	Sig. (2-tailed)	.697		.000	.001	.000
	N	124	124	124	124	124
TM_3	Pearson Correlation	.232**	.389**	1	.634**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000		.000	.000
	N	124	124	124	124	124
TM_4	Pearson Correlation	.252**	.289**	.634**	1	.762**
	Sig. (2-tailed)	.005	.001	.000		.000
	N	124	124	124	124	124
Skor_total	Pearson Correlation	.546**	.669**	.784**	.762**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	124	124	124	124	124

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	124	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	124	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.609	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TM_1	12.23	1.412	.204	.671
TM_2	12.70	1.170	.300	.627
TM_3	12.54	1.177	.608	.401
TM_4	12.56	1.142	.540	.429

**Variabel Tekanan Normatif (X4)****Correlations**

		TN_1	TN_2	TN_3	TN_4	Skor_total
TN_1	Pearson Correlation	1	.504**	.315**	.237**	.756**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.008	.000
	N	124	124	124	124	124
TN_2	Pearson Correlation	.504**	1	.268**	.297**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000		.003	.001	.000
	N	124	124	124	124	124
TN_3	Pearson Correlation	.315**	.268**	1	.433**	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003		.000	.000
	N	124	124	124	124	124
TN_4	Pearson Correlation	.237**	.297**	.433**	1	.681**
	Sig. (2-tailed)	.008	.001	.000		.000
	N	124	124	124	124	124
Skor_total	Pearson Correlation	.756**	.721**	.685**	.681**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	124	124	124	124	124

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	124	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	124	100.0

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.671	4

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TN_1	13.04	1.356	.468	.600
TN_2	12.81	1.572	.495	.579
TN_3	12.98	1.642	.450	.608
TN_4	12.85	1.594	.412	.630

## Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X5)

## Correlations

		SPIP_1	SPIP_2	SPIP_3	SPIP_4	SPIP_5	Skor_total
SPIP_1	Pearson Correlation	1	.532**	.391**	.506**	.467**	.763**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	124	124	124	124	124	124
SPIP_2	Pearson Correlation	.532**	1	.441**	.503**	.554**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	124	124	124	124	124	124
SPIP_3	Pearson Correlation	.391**	.441**	1	.541**	.542**	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	124	124	124	124	124	124
SPIP_4	Pearson Correlation	.506**	.503**	.541**	1	.675**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	124	124	124	124	124	124
SPIP_5	Pearson Correlation	.467**	.554**	.542**	.675**	1	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	124	124	124	124	124	124
Skor_total	Pearson Correlation	.763**	.785**	.735**	.814**	.813**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	124	124	124	124	124	124

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	124	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	124	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.836	5

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SPIP_1	16.69	1.973	.588	.822
SPIP_2	16.90	1.997	.637	.804
SPIP_3	17.03	2.162	.585	.817
SPIP_4	16.98	2.056	.702	.787
SPIP_5	16.93	2.100	.708	.788

### Lampiran 5 : Hasil Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.106	1.812		2.266	.025		
Pemanfaatan TI	.266	.091	.279	2.929	.004	.466	2.144
Tekanan Koersif	.036	.065	.052	.550	.583	.480	2.083
Tekanan Mimetik	.012	.120	.009	.101	.920	.523	1.914
Tekanan Normatif	.121	.102	.094	1.183	.239	.662	1.511
SPIP	.427	.087	.488	4.923	.000	.429	2.331

a. Dependent Variable: Akuntabilitas LK

### Lampiran 6 : Hasil Uji Heterokedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.399	1.071		1.306	.194
Pemanfaatan TI	-.028	.054	-.069	-.515	.608
Tekanan Koersif	.041	.038	.140	1.065	.289
Tekanan Mimetik	-.058	.071	-.104	-.826	.410
Tekanan Normatif	.031	.060	.058	.516	.607
SPIP	.002	.051	.006	.044	.965

a. Dependent Variable: Abs\_RES

### Lampiran 7 : Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		124
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.37742367
	Absolute	.114
Most Extreme Differences	Positive	.114
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		1.268
Asymp. Sig. (2-tailed)		.080

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Lampiran 8 : Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.981	.434		2.258	.026
1 PTI	.374	.094	.347	3.954	.000
TK	.218	.089	.228	2.455	.016
TM	.027	.116	.022	.229	.819
TN	.185	.091	.176	2.032	.044

a. Dependent Variable: ALK

### Lampiran 9 : Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.711	5.070		.535	.594
	PTI	-2.034	1.123	-1.891	-1.811	.073
	TK	1.409	.964	1.472	1.462	.147
	TM	-.181	1.285	-.152	-.141	.888
	TN	.796	1.126	.755	.707	.481
	SPIP	.005	1.197	.004	.004	.997
	Moderasi_X1.X5	.513	.255	3.560	2.013	.047
	Moderasi_X2.X5	-.280	.222	-1.953	-1.258	.211
	Moderasi_X3.X5	.029	.291	.191	.099	.921
	Moderasi_X4.X5	-.168	.267	-1.137	-.627	.532

a. Dependent Variable: ALK

### Lampiran 10 : Daftar Distribusi Kuesioner

No.	Nama SKPD	Kuesioner yang disebar	Kuesioner yang kembali	Kuesioner yang tidak kembali	Kuesioner yang dapat diolah	Kuesioner yang tidak dapat diolah
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	10	1	10	0
2.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	8	6	2	6	0
3.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah	10	8	2	8	0
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15	15	0	15	0
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	7	2	6	1

6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	8	1	7	2
7.	Dinas Kebakaran	10	10	0	10	0
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	8	1	6	2
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	10	0	10	0
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	9	0	8	0
11.	Sekretariat Daerah	31	29	2	28	1
12.	Sekretariat DPRD	10	10	0	10	0
<b>Total</b>		<b>141</b>	<b>130</b>	<b>11</b>	<b>124</b>	<b>6</b>